

LAPORAN KINERJA 2024

Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Sidoarjo Utara



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua, Om swastyastu, Namo buddhaya, Salam
kebajikan

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas
limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat mengabdikan pada
tanah air dan mengamankan penerimaan negara.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan
fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN-
RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan
ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program
kerja dan pencapaian target yang telah ditetapkan selama tahun 2024.
Sebagai institusi publik yang mengemban tugas strategis dalam menghimpun
penerimaan negara, KPP Pratama Sidoarjo Utara terus berkomitmen untuk
menjalankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan prima kepada
masyarakat.

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian yang
diraih sepanjang tahun 2024. Mencakup realisasi target, tantangan yang
dihadapi, serta langkah-langkah strategis yang telah diambil dalam
mendukung keberhasilan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN). Disusun secara ringkas, sistematis, dan berbasis data, laporan
ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat kepada para pemangku
kepentingan, baik internal maupun eksternal. Selain itu, laporan kinerja ini juga
menjadi alat evaluasi dan refleksi untuk meningkatkan kinerja di masa
mendatang.

Keberhasilan dalam mencapai target kinerja selama tahun 2024 tentunya
tidak terlepas dari kerja keras dan kolaborasi semua pihak yang terlibat. Kami
menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pegawai KPP
Pratama Sidoarjo Utara yang telah memberikan kontribusi terbaiknya, serta
para wajib pajak yang turut mendukung pencapaian target penerimaan pajak.

Dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya juga menjadi elemen penting dalam membangun sinergi yang kuat demi keberhasilan bersama.

Penyusunan laporan kinerja tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, informasi, dan inspirasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan dukungan dan kerja sama yang terus terjalin, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara dapat terus meningkatkan kinerjanya atas visi dan misi yang telah diamatkan.

Kepala Kantor



Nanik Triwahyuningsih

Daftar Isi

01

Pendahuluan

Latar Belakang, Kedudukan Tugas
& Fungsi, Struktur Organisasi,
Sistematika Laporan

02

Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis, Perencanaan
Anggaran dan Penyusunan
Perjanjian Kinerja 2024

03

Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi
Anggaran, Evaluasi dan Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja & Kinerja Lain-lain

04

Penutup

BAB I

01

Pendahuluan

Latar Belakang, Kedudukan Tugas
& Fungsi, Struktur Organisasi,
Sistematika Laporan



BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perpajakan di Indonesia, terutama dalam penghimpunan penerimaan negara melalui sektor pajak. Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh wajib pajak di wilayahnya memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik, sehingga mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan kebijakan fiskal yang terus berkembang, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara harus terus beradaptasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat efektivitas pengumpulan pajak.

Selama tiga tahun berturut-turut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara berhasil mencapai target penerimaan pajak yang telah diamanahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Capaian ini menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam penghimpunan pajak, yang tidak hanya berkontribusi pada penerimaan negara tetapi juga mencerminkan keberhasilan dalam implementasi berbagai program dan kebijakan yang mendukung optimalisasi pengumpulan pajak. Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata bahwa upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Sidoarjo Utara semakin efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperbaiki sistem pelayanan perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara sebagai Unit Eselon III di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyusun sebuah laporan kinerja (LAKIN) yang bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pencapaian target, realisasi program, serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode tahun 2024. Laporan ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui Laporan Kinerja (LAKIN) ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara tidak hanya mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program kerja kepada para pemangku kepentingan tetapi juga menggunakan laporan ini sebagai alat evaluasi untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dengan menyajikan data dan informasi secara transparan, laporan ini mencerminkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memastikan keberlanjutan kontribusi positif terhadap penerimaan negara.

Permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara adalah

1. Rendahnya Kontribusi Pajak dari Wajib Pajak Baru
2. Tantangan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
3. Kompleksitas Regulasi Pajak
4. Perluasan basis pajak yang belum optimal untuk menjangkau seluruh potensi wajib pajak
5. Penghindaran pelaksanaan kewajiban perpajakan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/Pmk.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak. Tugas tersebut mencakup berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka melaksanakan tugas pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang.

Selain peran strategis, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara juga berperan dalam mengelola informasi terkait subjek dan objek pajak di wilayah kerjanya. Semua tugas ini dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna memastikan kepatuhan Wajib Pajak serta mendukung pencapaian target penerimaan negara.

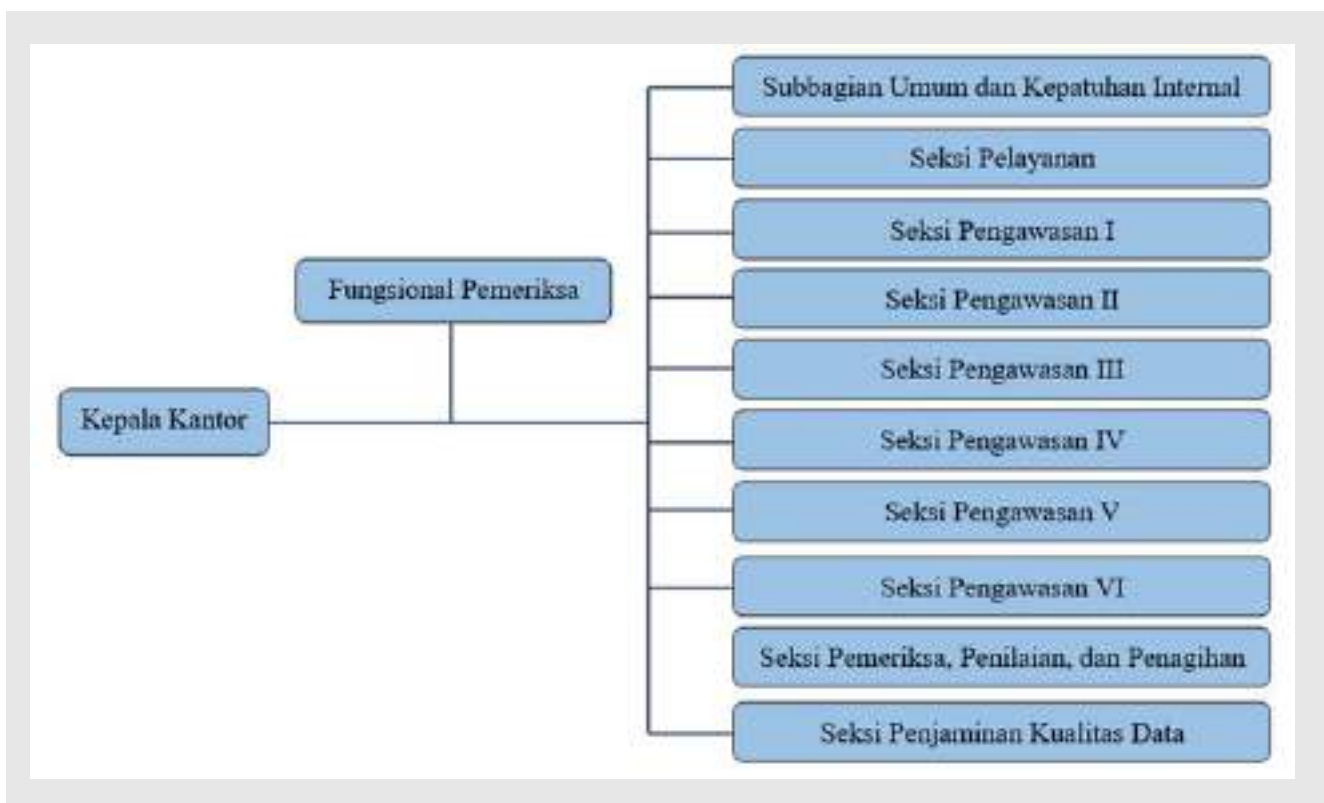
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyelenggarakan fungsi:

1. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4. Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. Pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
8. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
9. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
10. Penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
11. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. Pemutakhiran basis data perpajakan;
14. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
20. Pelaksanaan administrasi kantor.

STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi. Struktur organisasi ini terdiri dari beberapa unit kerja yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya. Struktur Organisasi KPP Pratama Sidoarjo Utara adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara



Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI

Masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan,

penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan in tensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara disusun dengan sistematika yang terstruktur dan komprehensif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, capaian, dan evaluasi kinerja. Adapun sistematika laporan ini terdiri dari empat bab utama sebagai berikut:

01 Pendahuluan

Bab ini berisi pengantar yang mencakup, Latar Belakang, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi yang menjelaskan posisi, tanggung jawab, serta peran KPP Pratama dalam pelaksanaan tugas perpajakan sesuai regulasi, Peran strategis KPP Pratama, Struktur Organisasi yang menyajikan struktur organisasi KPP Pratama yang mendukung pelaksanaan tugas, serta Sistematika Pelaporan yang menjelaskan susunan laporan ini, termasuk bab-bab yang disajikan berikutnya.

02 Perencanaan Kinerja

Bab ini disajikan penjelasan secara rinci mengenai Rencana Strategis (Renstra), prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024, perencanaan anggaran, penyusunan Rencana Kinerja (Renja), serta refinement Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko.

Bab ini menyajikan pencapaian kinerja organisasi secara rinci, mencakup:

- 1 **Capaian Kinerja Organisasi**
Pada subbab ini membandingkan target awal tahun dengan realisasi, menganalisis tren dua tahun terakhir, serta menjelaskan upaya dan tantangan dalam pencapaian target.
- 2 **Realisasi Anggaran**
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.
- 3 **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**
Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.
- 4 **Kinerja Lain-Lain**
Pada subbab ini dijelaskan terkait inovasi, penghargaan, atau capaian tambahan lainnya di tingkat wilayah, nasional, atau internasional.
- 5 **Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**
Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah

Bab ini berisi kesimpulan umum dari laporan, mencakup refleksi atas pencapaian dan evaluasi kinerja selama tahun 2024, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

BAB II

02

Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis, Perencanaan
Anggaran dan Penyusunan
Perjanjian Kinerja 2024



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN STRATEGIS

1) Rencana Strategis Kantor Pelayanan Pajak

Renstra atau Rencana Strategi menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan organisasi secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Perencanaan strategis merupakan kerangka kerja sistematis yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan jangka panjang secara efisien dan terkoordinasi. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara merupakan unit vertikal dibawah Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga rencana strategis yang dilaksanakan harus sejalan dengan rencana strategis DJP yang berisi penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun) yakni tahun 2020-2024 yang memuat visi-misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra Tahun DJP 2020-2024 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di level Kementerian Keuangan dan Nasional, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, agenda pembangunan yang terdapat pada RPJMN tahun 2020-2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Strategi Kemenkeu yang didukung oleh DJP dan seluruh unit vertikal dibawahnya adalah :

- 1) Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain:

pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan; penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan; dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

- 2)** Reformasi fiskal melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax system); upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai; serta penguatan kelembagaan penerimaan negara.

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020- 2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

- a)** Rasio Perpajakan terhadap PDB.
Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional;
- b)** Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system).
DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi yang ditujukan untuk meningkatkan tax ratio, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan meminimalisir kompleksitas dalam sistem perpajakan.

2. Dukungan Kantor Pelayanan Pajak terhadap Renstra DJP

Rencana Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara selaku unit vertikal DJP adalah selalu berupaya melaksanakan tugas operasional dibidang perpajakan. Hal ini berarti Kantor Pelayanan Pajak menjadi penghimpun penerimaan bagi negara yang bersumber dari masyarakat.

Dalam era globalisasi saat ini Kantor Pelayanan Pajak harus berpandangan jauh kedepan, berupaya meningkatkan kualitas agar lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menyelenggarakan birokrasi dengan baik dan menciptakan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. Meningkatkan kegiatan edukasi perpajakan efektifitas pengawasan kepatuhan melalui 5 pilar kepatuhan dan pengumpulan data lapangan berbasis penguasaan wilayah dan penegakan hukum dibidang perpajakan dengan didukung oleh SDM yang berintegritas dan profesional. Setiap aparat Kantor Pelayanan Pajak harus didorong untuk lebih meningkatkan integritas dan kredibilitasnya sehingga dapat dipercaya dan dibanggakan masyarakat serta dapat bekerja secara profesional dan efisien untuk mendukung tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Dalam rangka Pelaksanaan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara mendukung dan menyukseskan Reformasi Perpajakan PSIAP yang merupakan upaya DJP untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan Indonesia dengan mengutamakan prinsip-prinsip kesehatan fiskal, keadilan pajak, dan produktivitas ekonomi. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih modern, transparan, dan mampu mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Secara internal, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara juga melaksanakan pengendalian dan pengawasan internal yang rigid guna memastikan ditegakkannya integritas bagi semua civitas dan kegiatan didalamnya.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) KPP Pratama Sidoarjo Utara, disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L) dan Pagu Anggaran K/L. RKP berisi arah kebijakan pemerintah dan program prioritas yang diterjemahkan oleh K/L dalam Renja K/L. Rencana kerja dan anggaran KPP Pratama Sidoarjo Utara Tahun 2023 disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah, Renja Kementerian Keuangan, Renja DJP, alokasi pagu anggaran tahun 2024. Alokasi anggaran KPP Pratama Sidoarjo Utara Tahun 2024 adalah sebesar Rp6,131.253.000 ,-.Dalam perjalanan tahun 2024, setelah revisi terakhir yang dilakukan atas pagu 2024 tersebut adalah menjadi Rp6,678,330,000,- (pagu revisi data OMSPAN per 31 Desember 2024)



**Tabel Pagu Alokasi Anggaran KPP Pratama Sidoarjo Utara
Tahun Anggaran 2024**

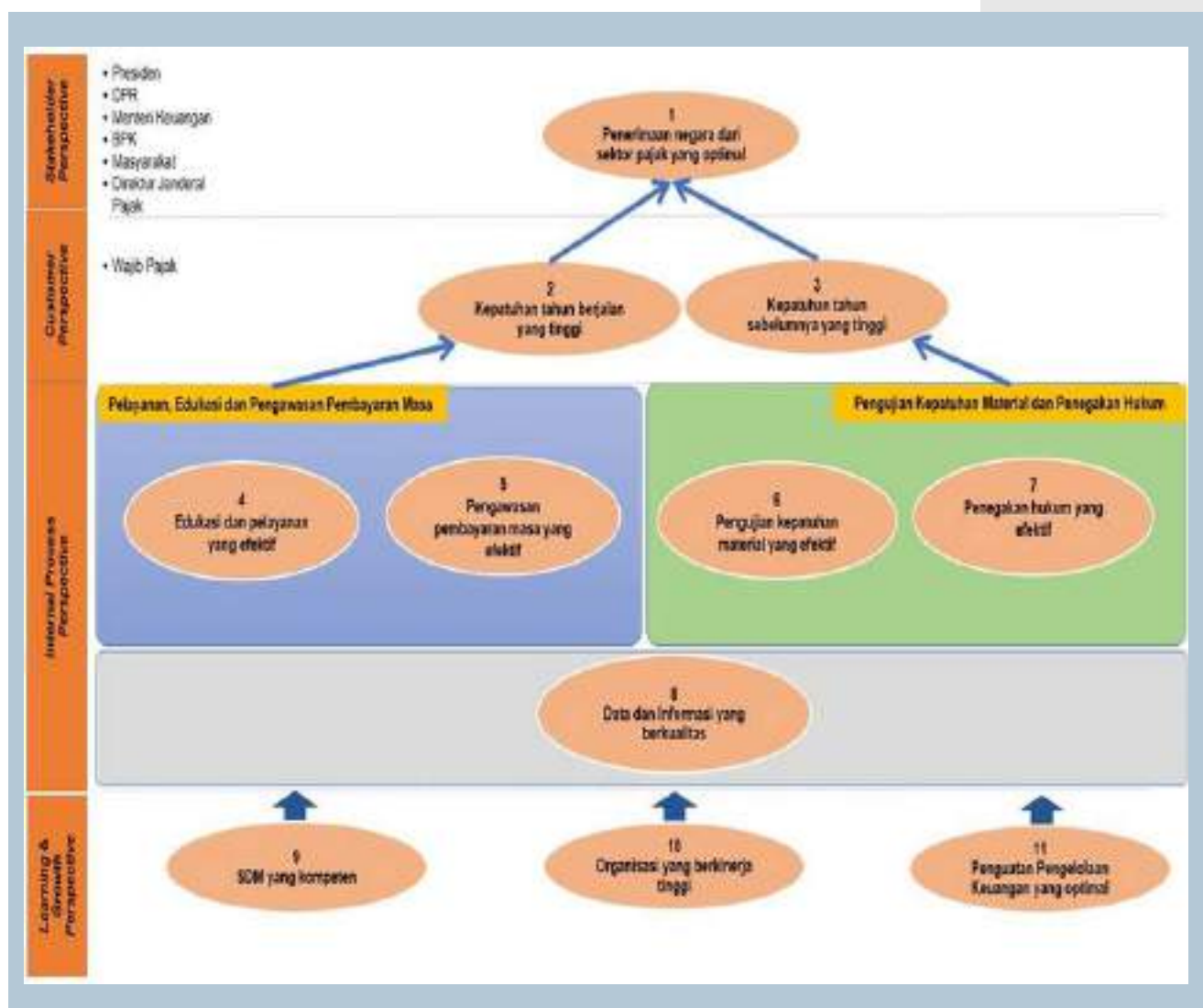
Struktur	Kode	Program/Sasaran Program/Indikator Kode Kinerja Program	Pagu Alokasi TA 2024	Realisasi TA 2024	Capaian (%)
Program Pengelolaan Penerimaan Negara	CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara		1,147,066,000	1,145,211,110	99.84%
	CC.4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	489,074,000	488,138,793	99.81%
	CC.4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	306,471,000	305,676,896	99.74%
	CC.4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum	351,521,000	351,395,421	99.96%
Program Dukungan Manajemen	WA Program Dukungan Manajemen		5,531,264,000	5,507,685,251	99.57%
	WA.4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	4,464,111,000	4,449,967,251	99.68%
	WA.4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	1,067,153,000	1,057,718,000	99.12%
Total			6,678,330,000	6,652,896,361	99.62%

PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Tahap akhir penjabaran visi adalah penjabaran program yang ditetapkan dengan suatu penetapan kinerja melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara disertai dengan indikator keberhasilan pencapaiannya. Pada Direktorat Jenderal Pajak, penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan melalui aplikasi E-performance dan Satu Kemenkeu pada modul kinerja organisasi. Adapun perjanjian dan penetapan kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan mengenai Sasaran Strategis (SS), dan Indikator Kinerja.

Perjanjian kinerja yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara adalah sebagai berikut :

Peta Strategis



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO UTARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%

6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
7	Penegakan Hukum Yang Efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/Kegiatan Tahun 2024		Anggaran	
A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara		Rp	1.147.066.000
1.	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	498.074.000
2.	Pelayanan,Komunikasi, dan Edukasi	Rp	306.471.000
3.	Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	351.521.000
B. Program Dukungan Manajemen		Rp	4.984.187.000
1.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	4.045.383.000
2.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	938.804.000
Total		Rp	6.131.253.000

Sidoarjo, 31 Januari 2024

Direktor  Widyah jak Jawa Timur II Ditandatangani Secara Elektronik Agustin Vita Avantin	Kepala Kantor  Sidarto jak Pratama Sidoarjo Ditandatangani Secara Elektronik Bambang Sutrisno
--	--

Adendum Perjanjian Kinerja Tahun 2024

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-10A/WPJ.24/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor PK-10/WPJ.24/2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Target dan Trajectory Indikator Kinerja Utama

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Sem. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Sem. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	90	-	-	-	80	85	80	80

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II,



Agustin Vita Avanti
NIP 196308171992012001

Sidoarjo, 2 September 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Utara



Nanik Triwahyuningsih
NIP 197340251995112001

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara Tahun 2024 terdiri dari sepuluh sasaran strategis dengan dua puluh Indikator Kinerja Utama (IKU). Didalam Perjanjian Kinerja juga memuat ringkasan mengenai program-program yang dilaksanakan untuk merealisasikan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor beserta anggaran dana yang digunakan. Pada tahun 2024 terdapat riwayat perubahan Manual IKU/IKI Unit Vertikal atas ND-31/PJ/PJ.01/2024 tentang Penyampaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Manual Indikator Kinerja, serta Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-Two sampai dengan Kemenkeu-Five Pada Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024.

Perubahan manual IKU yang berdampak kepada Kepala Kantor adalah Indeks Penilaian Integritas Unit (IKU 9c-N). Dimana terjadi perubahan target IKU yang semula tahunan menjadi triwulanan yang dimulai sejak triwulan III dengan nilai target sebesar 85. Perubahan inilah yang mengakibatkan Kepala Kantor harus melakukan Addendum Perjanjian Kinerja. Pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

BAB III

03

Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja
Organisasi, Realisasi Anggaran,
Evaluasi dan Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja & Kinerja
Lain-lain



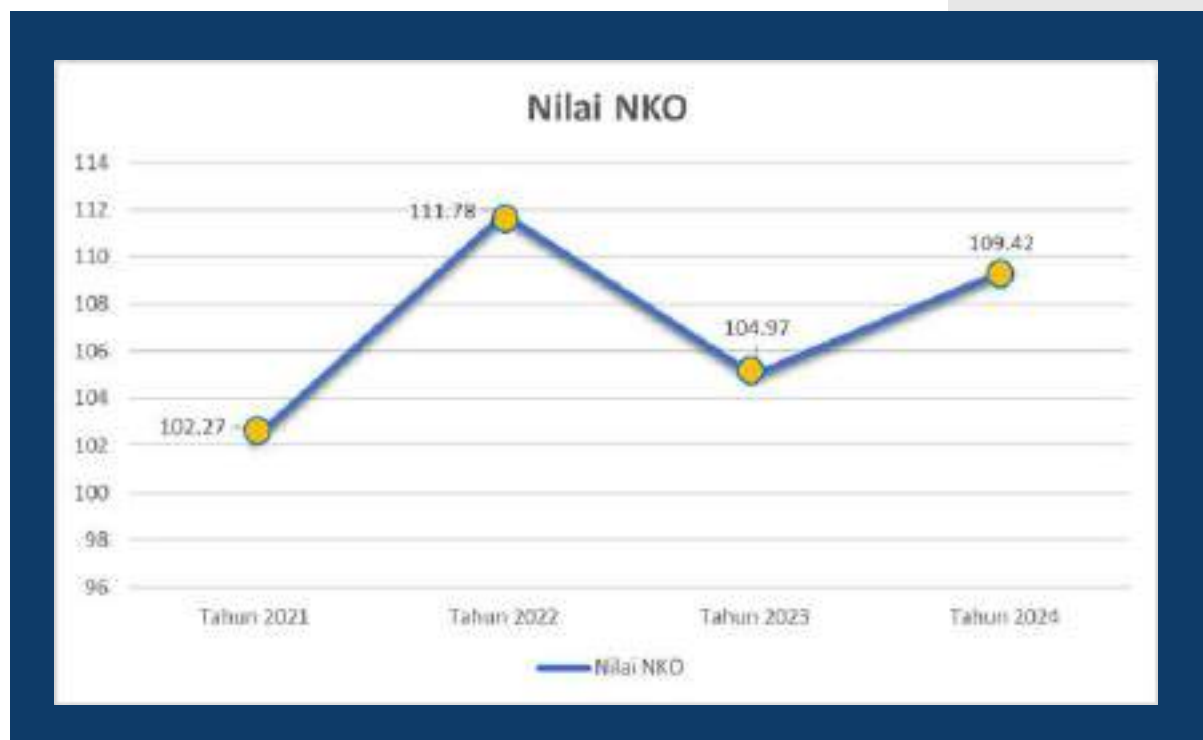
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, salah satu tahapan implementasi Manajemen Kinerja adalah Evaluasi Kinerja. Pelaksanaan evaluasi kinerja meliputi evaluasi kinerja organisasi dan evaluasi kinerja pegawai. Dalam tahapan Evaluasi Kinerja, terbagi menjadi 3 output, yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif.

Perkembangan NKO KPP Pratama Sidoarjo Utara Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024



Stakeholder Perspective

SS Penerimaan negara dari sector pajak yang optimal dan akuntabel

IKU Persentase Relisasi Penerimaan Pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun, target renja DJP, dan Realisasi IKU pada tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	21%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
Realisasi	28.12%	56.62%	56.62%	72.88%	72.88%	100.57%	100.57%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	104.11%	104.11%	100.57%	100.57%

Sumber : Dashboard Kineja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 pada Aplikasi Mador (<https://mandor-djp.intranet.pajak.go.id>) update 14 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan. Pelaksanaan mandat dan tugas tersebut akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan penuh integritas dan secara akuntabel.

• Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP)

• Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

• **Realisasi IKU**

Jenis Pajak	Target 2024	Realisasi s.d 31 Desember						
		2022	2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A. Pajak Penghasilan								
1. PPh NON MIGAS	1,135,368	890,509	877,596	1,112,060	-1.45	26.72	101.05	97.95
2. PPh MIGAS	0	-3,235,319	-1,213,921	-1,179,136	-62.48	-2.87	0.00	0.00
B. PPN dan PPnBM	1,061,907	593,380	740,411	1,098,172	24.78	48.32	103.89	103.42
C. PBB dan BPHTB	0	0,03	0	0	-100.00	0.00	0.00	0.00
D. Pendapatan PPh DTP	0	8,965	2,274	0	-74.63	-100.00	0.00	0.00
E. Pajak Lainnya	344	542	331	14	-38.96	-95.74	91.59	4.10
	2,197,619	1,493,394	1,620,612	2,210,245	8.52	36.38	102.47	100.57

Sumber : Kinerja Penerimaan KPP Sidoarjo Utara 2024 Pada Aplikasi Appportal

Realisasi IKU Persentase Penerimaan Pajak KPP Pratama Sidoarjo Utara tercapai sebesar Rp2.210.245.567.139 dengan capaian sebesar 100.57% dari target awal tahun. Realisasi sampai dengan triwulan IV Tahun 2024 tumbuh sebesar 36.38% diatas pertumbuhan nasional sebesar 3.37%. Realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Sidoarjo Utara ditopang oleh jenis pajak PPN Impor yang tumbuh sebesar 1086.26%, PPH Pasal 22 Impor tumbuh sebesar 122.62%, PPH Pasal 25/29 Badan 77.66% dan PPH Pasal 25/29 OP tumbuh sebesar 43.98%

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Th. 2020	Realisasi Th. 2021	Realisasi Th. 2022	Realisasi Th. 2023	Realisasi Th. Y
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	93.83%	86.44%	125.59%	102.14%	100.57%

Sumber : Laporan Validasi Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Sidoarjo Utara Tahun 2020 s.d. Tahun 2023 dan Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Triwulan IV Tahun 2024 update 14 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama tiga tahun berturut-turut. Adanya peningkatan yang signifikan terhadap realisasi penerimaan di tahun 2022 diakibatkan oleh suksesnya pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela pada KPP Pratama Sidoarjo Utara. Pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, upaya yang dilakukan agar tercapainya target penerimaan adalah dengan memperluas cakupan pengawasan kepatuhan wajib pajak dengan lebih intensif. Analisa terkait turunnya realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Sidoarjo Utara Tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

- 1 Dengan diberlakukannya tarif pemotongan PPh 21 dengan menggunakan skema tarif efektif rata-rata (TER) menyebabkan turunnya setoran PPh Pasal 21 pada Tahun 2024
- 2 Pada tahun 2023 terdapat pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Bea Meterai yang tidak berulang di tahun 2024 mengakibatkan penurunan penerimaan dari jenis setoran bea meterai
- 3 Pertumbuhan jenis pajak PPN Impor yang merupakan sektor dominan dalam penerimaan kantor memiliki trend yang tidak teratur. Seringkali wajib pajak importir melakukan pembayaran dengan nominal yang besar namun tidak berulang
- 4 Wajib Pajak Instansi Pemerintah mengalami shortfall penerimaan pada semester II tahun 2024

Upaya yang telah dilakukan dan solusi untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak adalah

- 1 Meningkatkan penggalan potensi kepada 90% Persen Wajib Pajak penentu penerimaan agar lebih efektif dan optimal karna menyasar wajib pajak yang sudah terklasifikasi dengan baik
- 2 Menyusun bahan baku pemeriksaan yang berkualitas yang berimplikasi pada ketetapan yang dapat dibayar oleh wajib pajak
- 3 Penyusunan DSPC yang berkualitas yang berimplikasi pada tagihan yang dapat dibayar oleh Wajib Pajak dan gencar melaksanakan kegiatan penagihan aktif

4. Melakukan pengawasan dan perhitungan shortfall dari berbagai jenis pajak yang merupakan sektor dominan penerimaan realisasi pajak pada KPP Pratama Sidoarjo Utara untuk kemudian diantisipasi dengan penambahan setoran dari jenis pajak lainnya
5. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada wajib pajak terdaftar secara massif terkait current issue baik melalui daring ataupun luring
6. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka pengamanan penerimaan pajak
7. Meningkatkan kualitas layanan terhadap masyarakat khususnya wajib pajak

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
Nama IKU	Target Th 2024 dalam Renja DJP	Target Th 2024 dalam Renstra DJP	Target Th 2024 dalam RPJMN	Target Th 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%		100%	100,57%

Sumber : Dokumen Renstra dan Renja DJP, Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Triwulan IV Tahun 2024 Update 14 Januari 2025

Terlampauinya target IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak didukung oleh kondisi ekonomi domestik yang terjaga dan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak sebagai implikasi dari peningkatan aktivitas pengawasan. Beberapa hal yang melatarbelakangi capaian kinerja penerimaan pada tahun 2024 adalah :

1. Pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif
2. Pelaksanaan Tindakan Penagihan, Pemeriksaan, dan Penilaian yang efektif
3. Peningkatan kualitas layanan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang efektif
4. Pelaksanaan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak berbasis risiko, pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak yang dilaksanakan dengan optimal

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama Iku	Target Th 2024	Standar Nasional (Perpres-76/2023)	Realisasi Th 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100.46%	100.57%

Sumber : Kinerja Penerimaan Nasional 2024 Pada Aplikasi Appportal

Realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Sidoarjo Utara mampu tumbuh sebesar 36.38% didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang baik dan peningkatan konsumsi domestik, serta keberhasilan aktivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak. Adanya dukungan kebijakan pemerintah terhadap penyusunan target penerimaan pajak yang realistis sesuai dengan kondisi ekonomi juga menjadi salah satu faktor penentu.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja realisasi IKU Persentase Penerimaan Pajak antara lain sebagai berikut :

1. Menerbitkan STP atas wajib pajak yang tidak/terlambat melakukan penyetoran, dan dinamisasi PPh 25
2. Meningkatkan penggalan potensi kepada 90% Persen Wajib Pajak penentu penerimaan agar lebih efektif dan optimal karna menyasar wajib pajak yang sudah terklasifikasi dengan baik
3. Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb
4. Tindak lanjut CRM, melalui visit, analisa dan mirroring hasil pemeriksaan
5. Melakukan perhitungan shortfall terkait penerimaan dari Instansi Pemerintah pada bulan Desember, untuk kemudian diantisipasi dengan penambahan setoran dari upaya PKM
6. Penyusunan bahan baku pemeriksaan yang berkualitas yang berimplikasi pada ketetapan yang dapat dibayar Wajib Pajak

7. Penyusunan DSPC yang berkualitas berimplikasi pada tagihan yang dapat dibayar oleh Wajib Pajak
8. Memastikan angka setoran PPN Impor pada Wajib Pajak Dominan setiap bulannya dengan cara konfirmasi ke Wajib Pajak atau ke Importir secara langsung
9. Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan terhadap terpenuhinya target IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak selama tiga tahun berturut-turut merupakan kerja keras dari semua pihak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara. Meskipun capaian pada tahun 2024 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yakni :

1. Dengan diberlakukannya tarif pemotongan PPh 21 dengan menggunakan skema tarif efektif rata-rata (TER) menyebabkan
2. turunnya setoran PPh Pasal 21 pada Tahun 2024
Terjadi penurunan penerimaan dari jenis setoran bea materai
Pertumbuhan jenis pajak PPN Impor yang merupakan sektor dominan
3. dalam penerimaan kantor memiliki trend yang tidak teratur. Seringkali wajib pajak importir melakukan pembayaran dengan nominal yang besar namun tidak berulang
4. Wajib Pajak Instansi Pemerintah mengalami shortfall penerimaan pada semester II tahun 2024

Upaya yang telah dilaksanakan demi menjaga realisasi penerimaan adalah dengan :

1. Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif
2. Peningkatan kualitas layanan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang efektif
3. Pelaksanaan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak berbasis risik
4. Pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak yang dilaksanakan dengan optimal

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai
2. Pembakalan terhadap pemahaman dan wawasan kepada pegawai dalam melaksanakan penegakan kepatuhan wajib pajak melalui pelaksanaan In House Training, Transfer of Knowledge pada masing-masing fungsi
3. Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi perpajakan kepada wajib pajak untuk layanan seperti e-filing, e-biling, dan e-registration
4. Memetakan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan beban kerja aktual pada setiap seksi/subbag
5. Pelaksanaan kolaborasi dan sinergi kepada stakeholder terkait dalam mengintegrasikan data wajib pajak

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas realisasi penerimaan merupakan hasil dari program/rencana kerja yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Sidoarjo Utara selama tahun 2024. Program/rencana kerja yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah
2. Penyusunan bahan baku pemeriksaan yang berkualitas. Implikasi pada ketetapan yang dapat dibayar Wajib Pajak
3. Penyusunan DSPC yang berkualitas. Implikasi pada tagihan yang dapat dibayar oleh Wajib Pajak
4. Melakukan pemetaan atas Importir yang melakukan Setoran tidak terduga dan importir baru namun memiliki setoran yang besar

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:

1. Membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan
2. Melakukan penerbitan SP2DK atas DPP
3. Penyusunan DSPC dengan data wajib pajak yang memiliki ATP baik
4. Pelaksanaan penagihan aktif secara tertib

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Salah satu kendala yang dihadapi adalah PPN Impor meningkat tapi tidak dapat diketahui secara pasti besaran setorannya, sehingga berakibat pada deviasi proyeksi penerimaan per bulan tidak dapat diperkirakan mendekati angka riil. Untuk mengatasai kendala tersebut Langkah yang telah diambil adalah melakukan pemantauan terhadap Wajib Pajak penentu Penerimaan dan Wajib Pajak Importir dan melakukan pendekatan secara intens kepada wajib pajak

- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial
3. bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim
2. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat
3. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi selanjutnya	Periode
Melakukan pemantauan dan penggalan potensi terhadap Wajib Pajak penentu Penerimaan dan Wajib Pajak Importir	2025
Melaksanakan kegiatan penagihan aktif secara intens	2025
Menyusun bahan baku pemeriksaan dan DSPc yang berkualitas	2025
Melaksanakan kolaborasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka penggalan potensi terhadap wajib pajak	2025
Melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak berbasis risiko, dan melaksanakan Komite Kepatuhan Wajib Pajak dengan optimal	2025

Stakeholder Perspective

SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	105%	105%	105%	105%	105%	105%
Capaian	100%	105%	105%	105%	105%	105%	105%

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Update 14 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan. Pelaksanaan mandat dan tugas tersebut akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan penuh integritas dan secara akuntabel

• Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan

2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu 8%.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

• Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas	=	50% Indeks Capaian Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto	+	50% Indeks Capaian Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Penerimaan Kas
--	---	--	---	--

• **Realisasi IKU**

Capaian sampai dengan triwulan IV IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sebesar 105%. Secara garis besar capaian triwulan IV dipengaruhi oleh dua komponen. Yakni pertumbuhan penerimaan bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dengan pembagian proposi 50:50 untuk setiap komponen. Pada komponen pertumbuhan bruto, KPP Pratama Sidoarjo Utara memperoleh capaian 100% dengan nilai sebesar Rp2.243.166.911.388 atau setara dengan 36.28% diatas pertumbuhan nasional sebesar 5.02%. Oleh karena itu, realisasi pertumbuhan penerimaan bruto KPP Pratama Sidoarjo Utara sebesar 120%. Sedangkan pada kompones Proyeksi Perencana Kas, pada prognosa tertera sebesar Rp2.097.587.622.000 dengan realisasi Rp2.210.245.567.139. Nilai deviasi sempat mengalami peningkatan pada triwulan I dan triwulan III dan berakhir dengan realisasi sebesar 90% pada triwulan IV. Optimalisasi masih dapat dilakukan dengan cara meminimalisir tingginya angka deviasi tiap-tiap bulan dengan perencanaan ketersediaan kas yang lebih akurat.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Th. 2020	Realisasi Th. 2021	Realisasi Th. 2022	Realisasi Th. 2023	Realisasi Th. Y
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas				114.51%	105%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Sidoarjo Utara Tahun 2023 dan Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor update 15 Januari 2025

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas baru dilaksanakan sejak tahun 2023. Sebelumnya iku ini hanya mengandung satu komponen yakni realisasi penerimaan pajak bruto. Perubahan pada manual iku tersebut mengakibatkan tidak bisa dilakukan perbandingan realisasi kinerja hingga lima tahun kebelakang. Salah satu penyebab turunnya realisasi pada tahun 2024 adalah deviasi proyeksi perencanaan kas yang tinggi pada triwulan I sebesar 14.32% dan triwulan III sebesar 11.09%.

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •

Solusi yang telah dilaksanakan adalah Optimalisasi tugas dan fungsi Komite Kepatuhan dan optimalisasi pencairan SP2DK dari DPP, Menindaklanjuti DPP Semester I dan II tahun 2024 (penerbitan LHPt dan LHP2DK), Penyelesaian data DDRM Prioritas 100 data terbesar, dan Percepatan penyelesaian Pemeriksaan untuk Wajib Pajak tahun Pajak 2019, Coretax, Wajib Pajak lebih dari 8 bulan, Wajib Pajak 100 besar Kantor Wilayah.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Th 2024 dalam Renja DJP	Target Th 2024 dalam Renstra DJP	Target Th 2024 dalam RPJMN	Target Th 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas				100%	105%

Sumber : Dokumen Renstra dan Renja DJP, Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Triwulan IV Tahun 2024 Update 14 Januari 2025

Pada dokumen Renstra dan Renja DJP tidak memasukkan IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas dalam target tahun 2024. KPP Pratama Sidoarjo Utara berhasil mendapatkan realisasi sebesar 105% dari target. Keberhasilan ini didukung oleh kinerja semua fungsi yang mampu bekerja sama dan kolaborasi dalam rangka mengamankan penerimaan pajak. Rekomendasi rencana aksi yang dapat dilaksanakan adalah penyampaian quick win untuk masing-masing fungsi agar memperoleh gambaran terhadap Langkah konkret yang harus dilaksanakan kedepannya.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Beberapa upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Sidoarjo Utara untuk menunjang capaian kinerja realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas adalah sebagai berikut :

1. Mempelajari trend dan kebiasaan penyetoran pajak Wajib Pajak dominan dan Wajib Pajak baru dengan setoran pajak yang besar tahun 2024
2. Membangun komunikasi yang efektif dengan wajib pajak importir yang pembayarannya besar dan tidak teratur (impor tidak terulang) dan instansi pemerintah yang memiliki setoran besar agar melakukan pembayaran di awal bulan dan menyampaikan informasi jumlah setoran impor yang akan disetor sebelum jatuh tempo pengiriman dokumen proyeksi perencanaan penerimaan kas
3. Optimalisasi tugas dan fungsi Komite Kepatuhan
4. Menerbitkan STP kepada Wajib Pajak yang kurang setor bayar
5. Mengoptimalkan pengawasan wajib pajak yang bergerak di sektor dominan penentu penerimaan
6. Melakukan pengamatan melalui kegiatan kunjungan kerja, konseling ke wajib pajak dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi indeks penerimaan pertumbuhan bruto dan proyeksi deviasi perencanaan kas antara lain keberhasilan tercapainya target IKU tidak lepas dari program kerja yang dilaksanakan dengan baik. Yakni peningkatan pengawasan pada setiap fungsi yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membangun hubungan baik dengan para wajib pajak

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam konteks capaian Indeks Penerimaan Pajak Bruto dan Proyeksi Deviasi Perencanaan Kas adalah upaya untuk memaksimalkan hasil penerimaan dengan meminimalkan pengeluaran atau pemakaian sumber daya, baik sumber daya manusia, finansial, maupun material. Diantara adalah ;

1. Menggunakan data historis untuk memperkirakan penerimaan bruto di masa mendatang dan mengalokasikan sumber daya lebih efisien
2. Memanfaatkan sistem aplikasi internal salah satunya matoa untuk penggalian potensi terhadap wajib pajak
3. Melaksanakan kunjungan terhadap wajib pajak dalam rangka pendekatan terhadap wajib pajak yang dilaksanakan sekaligus melalui kegiatan visit wajib pajak

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Kantor Pelayanan Pajak Pratam Sidoarjo Utara adalah fokus penggalian potensi terhadap wajib pajak penentu penerimaan, optimalisasi pelaksanaan kolaborasi antara seksi pengawasan dan fungsional pemeriksa pajak dalam melakukan bedah wajib pajak kewilayahan, dan melaksanakan penjagaan secara internal dengan memanfaatkan penggunaan inovasi sidut data analitik yang dapat membantu pegawai dalam melaksanakan pemantauan terhadap wajib pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Salah satu upaya dalam memitigasi risiko yang telah disusun awal tahun untuk mengamankan capaian Indeks Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas adalah Pelaksanaan bedah wajib pajak secara komprehensif yang melibatkan para Account Representative dan Fungsional Pemeriksa Pajak. Bedah wajib pajak ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak melalui identifikasi, analisis, dan penanganan potensi pajak yang belum tergal. Selain itu, dengan memanfaatkan data yang sudah terintegrasi mampu mempermudah penyusunan profil wajib pajak secara lebih detail.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi dalam proses pencapaian target antara lain:

1. Banyak wajib pajak yang tidak memahami pentingnya membayar pajak, baik secara individu maupun perusahaan. Yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan atau kelalaian dalam melaporkan dan membayar pajak
2. Informasi tentang wajib pajak seringkali tidak lengkap atau tidak mutakhir, sehingga menyulitkan penggalan potensi pajak

Untuk mengatasi kendala yang terjadi, langkah-langkah yang telah dilakukan adalah :

- a. Meningkatkan edukasi dan kesadaran wajib pajak
- b. Memperkuat basis data dan integrasi teknologiMendukung pelaksanaan
- c, reformasi perpajakan
- d. Melaksanakan kolaborasi dengan pihak terkait dalam pengumpulan informasi wajib pajak

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi selanjutnya	Periode
Penyampaian Quick Win masing-masing fungsi	2025
Penyelesaian data DDRM Prioritas 100 data terbesar	2025
Menyusun bahan baku pemeriksaan dan DSPc yang berkualitas	2025
Mengoptimalkan kolaborasi antara Seksi Pengawasan dengan FPP dalam melakukan bedah WP Kewilayahan	2025
Melaksanakan kolaborasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bidang DP3 dengan Kantor Wilayah	2025
Percepatan penyelesaian Pemeriksaan untuk Wajib Pajak tahun Pajak 2019, Coretax, Wajib Pajak lebih dari 8 bulan, Wajib Pajak 100 besar Kantor Wilayah	2025

Customer Perspective
SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	21%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
Realisasi	29%	58.45%	58.45%	74.76%	74.76%	100.56%	100.56%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	100.56%	100.56%

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Update 14 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan. Pelaksanaan mandat dan tugas tersebut akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan penuh integritas dan secara akuntabel.

• Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

• Formula IKU

Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM	x 100%
Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM	

• **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 KPP Pratama Sidoarjo Utara sebesar Rp2.064.904.188.000 dengan capaian 100.56%. Diatas capaian kantor wilayah sebesar 100.08%

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Th. 2020	Realisasi Th. 2021	Realisasi Th. 2022	Realisasi Th. 2023	Realisasi Th. Y
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa					100.56%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Sidoarjo Utara Tahun 2023 dan Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor update 14 Januari 2025

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan). IKU Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa hanya bisa dibandingkan hingga empat tahun kebelakang karena pada tahun 2020 tidak terdapat IKU tersebut. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara berhasil melampaui target selama 3 tahun berturut-turun. Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara mendapat amanah target PPM 57.38% lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2023, dengan pertumbuhan positif sebesar 36.38% pada tahun 2024. Menghadapi tantangan tersebut KPP Pratama Sidoarjo Utara berhasil membukukan capaian sebesar 100,56%

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
Nama IKU	Target Th 2024 dalam Renja DJP	Target Th 2024 dalam Renstra DJP	Target Th 2024 dalam RPJMN	Target Th 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa	100%	100%		100%	100.56%

Sumber : Dokumen Renstra dan Renja DJP, Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Triwulan IV Tahun 2024 Update 14 Januari 2025

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara berhasil mencapai target Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa selama tiga tahun berturut turut. Pencapaian ini tidak lepas dari beberapa program yang telah dilaksanakan. Yakni pemantauan pembayaran masa seluruh Wajib Pajak berbasis kewilayahan (terlambat/tidak ada setoran), Penerbitan STP, Penyelesaian Data Matching, dan Pengawasan berbasis Tabelaris Pengawasan Pembayaran Masa 10 Wajib Pajak Terbesar, dan Pengawasan Wajib Pajak Bendahara.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya extra effort yang telah dilakukan dalam menunjang keberhasilan capaian kinerja pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara adalah melakukan monitoring dan evaluasi pada seksi pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam mengoptimalkan kegiatan pengawasan pembayaran masa seperti penerbitan STP, penambahan wajib pajak baru, dinamisasi PPh Pasal 25 dan tindak lanjut data pemicu tahun berjalan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Salah satu kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara adalah fluktuasi omzet wajib pajak yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal kantor maupun faktor eksternal seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang juga berdampak pada penerimaan pengawasan pembayaran masa yang dianggap rutin. Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah :

1. Visit ke lokasi wajib pajak yang melakukan pembayaran namun belum melakukan pelaporan
2. Berkoodinasi dengan asosiasi untuk melaksanakan asistensi pelaporan SPT
4. Edukasi kepada wajib pajak dengan bekerja sama dengan pihak terkait dalam rangka penyusunan pelaporan keuangan yang digunakan sebagai kelengkapan SPT Tahunan
4. Berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan Dinas Perjinaan untuk melaksanakan asistensi pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak UMKM

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan langkah penting untuk memastikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan penerimaan pajak berjalan dengan optimal, efektif, dan efisien. Efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara dalam memastikan tercapainya target IKU Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah sebagai berikut :

1. Melakukan analisis data dan mengidentifikasi sumber penerimaan yang dapat digunakan sebagai penggalan potensi dengan memaksimalkan aplikasi ataupun sistem informasi yang telah dimiliki Direktorat Jenderal Pajak
2. Minimalisasi biaya operasional yang tidak terkait langsung dengan penerimaan, seperti biaya transportasi atau dokumentasi manual
3. Melaksanakan pengawasan internal terhadap prosedur pemeriksaan kepatuhan wajib pajak

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin. Dalam pelaksanaan monev internal, masing masing aktor dan jajaran manajerial menyampaikan terkait capaian penerimaan pajak, kendala yang terjadi di lapangan, dan menentukan langkah perbaikan. Selain itu pemanfaatan Dashboard Kinerja Kantor Pelayanan Pajak juga dilaksanakan dengan baik untuk melakukan analisis dan identifikasi terkait penerimaan pajak secara real-time berdasarkan sektor, wilayah, atau jenis pajak.

Pelaksana program semacam ini menjadi wujud nyata pelaksanaan efisiensi sumber daya

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pencapaian Kinerja yang baik sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 merupakan bukti nyata dari efektivitas strategi/program kerja yang diterapkan, inovasi berkelanjutan, dan komitmen penuh terhadap kualitas dan pelayanan. Program kerja yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara dalam mencapai target persentase realisasi penerimaan dari kegiatan pengawasan pembayaran masa adalah :

1. Melaksanakan pemutakhiran data pajak berupa profiling wajib pajak dengan cara melakukan pengelompokan wajib pajak berdasarkan sektor usaha, potensi pajak, dan kepatuhan untuk menentukan prioritas pengawasan.
2. Melaksanakan cleansing data. Yakni memperbarui data wajib Pajak untuk mengidentifikasi Wajib Pajak non-aktif, Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT, atau Wajib Pajak yang potensial tetapi belum terdaftar.
3. Melaksanakan ekstensifikasi pajak dengan cara melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan dan pengamatan terhadap proses bisnis wajib pajak
4. Melaksanakan notifikasi proaktif terhadap wajib pajak. Dengan cara mengirimkan blast melalui email, whatsapp, dan media sosial Kantor Pelayanan Pajak terkait tenggat waktu pelaporan dan pembayaran pajak

5. Menganalisis data integral menggunakan power BI sebagaimana inovasi yang dibuat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara untuk mengidentifikasi faktur pajak 00, jumlah setoran wajib pajak yang tidak sesuai potensi, dll

- • •
• • •
• • •
• • •
• • •
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pelaksanaan terhadap rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya berjalan dengan baik. Terbukti Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara dapat mencapai target realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa selama tiga tahun berturut-turut. Salah satu mitigasi risiko yang dilakukan adalah melakukan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan compliance ratio, memberikan pelayanan prima sebagai bagian dari reformasi birokrasi pajak, kunjungan untuk memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh sekaligus menyampaikan informasi tentang kewajiban pajak, mengelompokkan dan menganalisis wajib pajak berdasarkan sektor usaha, potensi pajak, dan kepatuhan untuk menentukan prioritas pengawasan

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Analisis atas kendala yang dihadapi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yakni kendala internal maupun eksternal. Pada sisi internal, kendala yang terjadi adalah terdapat data wajib pajak yang belum terintegrasi secara sempurna atau tidak diperbarui sesuai dengan kondisi di lapangan. Pada sisi eksternal, kendala yang sering dihadapi adalah kurangnya pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakan, wajib pajak yang sengaja menghindari pajak, dan kompleksitas regulasi perpajakan yang dipandang sulit untuk dipahami oleh wajib pajak. Atas kendala yang terjadi, langkah konkrit yang telah dilaksanakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan edukasi rutin dalam rangka pelaksanaan penyuluhan pajak kepada wajib pajak melalui seminar, webinar, kunjungan langsung (visit), pelaksanaan layanan di luar kantor untuk meningkatkan kesadaran pajak dan membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya.

2. Melakukan pendekatan persuasif dengan menghubungi wajib pajak yang terlambat lapor atau membayar pajak untuk mendorong kepatuhan secara sukarela sebelum menerapkan sanksi administrasi
 3. Berkolaborasi dengan stakeholder terkait untuk mendapatkan tambahan data yang relevan dengan kondisi wajib pajak
 4. Menggunakan teknologi analitik untuk menggali potensi pajak dari transaksi yang dilakukan wajib pajak
 5. Menganalisis data SPT wajib pajak dan mencocokkan dengan data transaksi untuk mendeteksi ketidaksesuaian
 6. Melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara tentang analisis data, penggunaan teknologi, dan tata cara komunikasi dan negosiasi kepada wajib pajak melalui pelaksanaan In House Training
- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara termasuk Kantor Pajak yang memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Terlihat dari kemudahan akses dan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak dengan kondisi tertentu. Dengan mengedepankan GEDSI, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara turut memastikan bahwa setiap civitas maupun wajib pajak yang termasuk dari kelompok rentan (gender, disabilitas, dan kelompok sosial tertentu), memiliki akses yang setara terhadap sistem perpajakan, pengawasan, dan manfaat dari pengelolaan pajak. Untuk kemudahan akses dan layanan terhadap wajib pajak kelompok rentan, kantor Pelayanan Pratama Sidoarjo Utara menyediakan fasilitas berupa guiding block bagi tunanetra, antrian khusus kelompok rentan, akses kursi roda, loket layanan prioritas, dan nursing room bagi Ibu hamil dan menyusui. Kaitannya dengan penerimaan pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, berikut langkah yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara :

1. Memberikan memberikan fasilitas konsultasi dan layanan permohonan khusus bagi wajib pajak kelompok rentan dan memastikan mereka memahami dan memiliki kendali atas kewajiban pajaknya.
2. Memastikan bahwa kelompok rentan memiliki kesempatan yang sama untuk memengaruhi kebijakan pajak melalui survei kepuasan layanan yang melibatkan mereka
3. Bekerja sama dengan komunitas perempuan, penyandang disabilitas, dan asosiasi sosial untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam diskusi pajak

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara adalah Penerbitan STP tepat waktu dengan prioritas daftar nominatif yang harus diterbitkan, pengawasan setoran Wajib Pajak per bulan, penerbitan LHPt atas data pemicu tahun berjalan yang turun di Approweb, melakukan kunjungan ke lokasi Wajib Pajak yang aktif namun tidak ada pembayaran

Customer Perspective

SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

IKU Persentase rcapaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	29%	58.45%	58.45%	108.20%	108.20%	102.05%	102.05%
Capaian	48.33%	73.06%	73.06%	120%	102.00%	102.05%	102.05%

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Update 14 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

- SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;

- atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

• Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

• Realisasi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara sebesar 102.05%. Capaian ini memperhitungkan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak yang dilaksanakan tepat waktu dengan bobot 1,2 dijumlah dengan penyampaian SPT yang disampaikan tidak tepat waktu dan dibagi oleh target penyampaian SPT. Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara mendapatkan target penyampaian SPT sebanyak 54.286 dari jumlah wajib lapor sebanyak 64.780. Dari jumlah SPT yang masuk, sebanyak 27.566 laporan dari wajib pajak wajib lapor dinyatakan tepat waktu, 3.691 laporan dari wajib pajak wajib lapor tidak tepat waktu, 16.548 laporan dari bukan wajib pajak wajib SPT lapor tepat waktu, dan 2.078 laporan dari bukan wajib pajak wajib SPT terlambat.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Th. 2020	Realisasi Th. 2021	Realisasi Th. 2022	Realisasi Th. 2023	Realisasi Th. Y
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi					102.05%

Sumber : Validasi Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Sidoarjo Utara Tahun 2020 s.d. 2023 dan Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Update 14 Januari 2025

Realisasi capaian IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengingat bahwa cara penghitungan dan formula penghitungan yang berbeda. Realisasi IKU di tahun-tahun sebelumnya hanya berasal dari seberapa banyak jumlah SPT Tahunan PPh yang masuk tanpa adanya pembobotan dan klasifikasi ketepatan waktu penyampaian laporan SPT Tahunan. Keberhasilan atas capaian pada tahun 2024 yang telah dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara adalah rutin mengadakan sesi penyuluhan untuk wajib pajak, baik individu maupun badan, tentang tata cara pelaporan SPT dan peraturan pajak terbaru; menyelenggarakan helpdesk khusus SPT pada masa pelaporan SPT dengan tujuan melayani wajib pajak yang membutuhkan bantuan teknis yang dilakukan didalam kantor maupun diluar kantor; melibatkan Pejabat Publik dan Tokoh Lokal untuk memberikan testimoni dan memberikan contoh pelaporan SPT secara simbolis; menyediakan layanan pelaporan pajak keliling ke lokasi-lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan, kampus, atau kawasan industri.

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Th 2024 dalam Renja DJP	Target Th 2024 dalam Renstra DJP	Target Th 2024 dalam RPJMN	Target Th 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi				100%	102.05%

Sumber : Dokumen Renstra dan Renja DJP, Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Triwulan IV Tahun 2024 Update 14 Januari 2025

Tercapainya tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi cukup menggambarkan tangka kepatuhan yang meningkat. Beberapa hal yang melatarbelakangi kinerja kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sampai dengan akhir tahun 2024 diantaranya melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap jumlah SPT yang telah dilaporkan, menganalisis kendala yang dihadapi wajib pajak, dan melakukan perbaikan layanan.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja realisasi IKU Persentase Penerimaan Pajak antara lain sebagai berikut :

1. Melaksanakan Layanan Diluar Kantor (LDK) di setiap kecamatan yang merupakan wilayah kerja dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara. Dimana Kegiatan Layanan Diluar Kantor pada tahun 2024 terlaksana sejumlah 55 kegiatan dan tercatat sebagai jumlah pelaksanaan LDK terbanyak ketiga nasional.

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •

2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi dan badan tiap triwulan.

Melakukan kolaborasi antara Seksi Pengawasan dan Seksi

3. Penjaminan Kualitas Data terkait wajib pajak yang belum melaksanakan pelaporan SPT Tahunan.
4. Edukasi kepada wajib pajak melalui kelas pajak yang dilaksanakan daring ataupun luring dengan tema pelaporan SPT Tahunan.
5. Himbauan kepada wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan melalui kanal aplikasi whatsapp blast guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Analisis terhadap keberhasilan capaian kepatuhan terhadap pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi adalah :

1. Pelaksanaan edukasi terhadap wajib pajak yang dilakukan secara massif oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratam Sidoarjo Utara melalui kelas pajak yang dilakukan secara daring maupun luring, kegiatan Bussiness Develompent Services yang melibatkan wajib pajak pelaku usaha UMKM, kegiatan pajak bertutur dan tax goes to school/campus, pelaksanaan Kegiatan Diluar Kantor, dan pemberian layanan konsultasi untuk membantu wajib pajak memahami kewajibannya melalui layanan media sosial KPP (Whatsapp, Telegram, Email, maupun Instagram)
Menindaklanjuti daftar nominatif dalam pemberian sanksi tegas bagi
2. wajib pajak yang tidak patuh. Baik berupa sanksi dan/atau denda maupun dengan langkah hukum lainnya
Bekerjasama dengan organisasi atau komunitas untuk meningkatkan
3. kesadaran terhadap pajak

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Beberapa langkah yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara dalam pelaksanaan kinerja tingkat kepatuhan penyampaian laporan SPT PPh Tahunan wajib pajak adalah :

1. Efisiensi dalam penggunaan data dan teknologi analitik prediktif. Dimana data dan teknologi digunakan untuk meminimalkan waktu invetigasi, verifikasi data, dan identifikasi wajib pajak yang belum melakukan penyampaian pelaporan SPT sehingga himbauan, dan penerbitan Surat Teguran menyasar tepat kepada wajib pajak yang bersangkutan
2. Optimalisasi pegawai pada kantor pajak untuk dilibatkan secara optimal melalui satgas/ penjadwalan pelaksanaan piket helpdesk pelaporan SPT Tahunan
3. Menggunakan media sosial, kelas pajak/sosialisasi online, dan email/whatsapp blast untuk menyebarkan informasi terkait pelaporan SPT yang mampu menghemat biaya dibandingkan sosialisasi fisik.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kepatuhan penyampaian SPT adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi berbasis data. Mengoptimalkan dashboard capaian yang menunjukkan tingkat pelaporan SPT Tahunan secara real-time untuk memonitor pencapaian target dan menentukan langkah korektif dengan cepat. Sejalan dengan pelaksanaan monitoring, jajaran manajerial juga melaksanakan evaluasi secara rutin terhadap efektivitas pelaksanaan program. Dengan fokus utama menghitung rasio antara penggunaan sumber daya (biaya, waktu, dan tenaga) dengan peningkatan hasil pelaporan SPT PPh Tahunan yang telah dilakukan oleh wajib pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko yang telah disusun pada awal tahun dalam pencapaian kinerja tahun 2024 adalah optimalisasi kelas pajak dan layanan diluar kantor dalam rangka memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam menyampaikan laporan SPT Tahunan dan melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk menjadwalkan asistensi pelaporan SPT Tahunan secara masal

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Beberapa langkah yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara dalam pelaksanaan kinerja tingkat kepatuhan penyampaian laporan SPT PPh Tahunan wajib pajak adalah :

- • •
 - 1. Banyak Wajib Pajak yang kurang memahami kewajiban perpajakan, termasuk tata cara pelaporan SPT. Hal ini terutama terjadi pada wajib pajak baru atau individu yang tidak memiliki latar belakang akuntansi atau perpajakan. Disamping itu, ada Sebagian wajib pajak yang belum menyadari pentingnya melaporkan SPT. Baik dari aspek hukum maupun kontribusi terhadap negara
 - 2. Kendala teknis yang mungkin terjadi adalah sistem pelaporan elektronik yang mengalami gangguan pada masa puncak pelaporan. Seperti server overload, dsb.
 - 3. Adanya unsur kesengajaan dari wajib pajak untuk tidak melaksanakan kewajiban pelaporan wajib pajak karena menganggap tidak akan ada pengawasan khusus atau penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan

Adapun Langkah-langkah yang dilaksanakan untuk meminimalisir kendala terhadap pencapaian target adalah meningkatkan intensitas edukasi kepada wajib pajak melalui media sosial, seminar, atau penyuluhan langsung; Menyediakan layanan konsultasi gratis dan responsif untuk membantu wajib pajak melaporkan SPT dengan mudah dan memberikan solusi cepat atas kendala teknis yang dialami wajib pajak.

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

- 1. Menghimbau wajib pajak yang baru terdaftar di 2024 untuk melaksanakan pelaporan SPT Tahunan pertama
- 2. Melaksanakan Layanan di Luar Kantor dengan tujuan mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan
- 3. Himbauan kepada wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan melalui kanal aplikasi whatsapp.
- 4. Mengadakan kegiatan kelas pajak

Customer Perspwtive

SS Kepathuan tahun sebelumnya yang tinggi

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun, target renja DJP, dan Realisasi IKU pada tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	13.07%	31.16%	31.16%	47.14%	47.14%	100.85%	100.85%
Capaian	52.28%	62.32%	62.32%	62.85%	62.85%	100.85%	100.85%

Sumber : Dashboard Kineja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 pada Aplikasi Mador (<https://mandor-djp.intranet.pajak.go.id>) update 14 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

• Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	= $\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$
--	---

- **Realisasi IKU**

Capaian realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang berhasil dicapai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara Tahun 2024 sebesar Rp133.838.157.176 dengan capaian 100.85%. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dashboard Revenue Mangement (DRM), realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM terdiri atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan dan PKM Lainnya sebesar Rp75.023.340.861, dari kegiatan Edukasi sebesar Rp380.285.980, kegiatan Pemeriksaan sebesar Rp42.950.850.278, kegiatan Penegakan Hukum sebesar Rp1.744.101.220, dan kegiatan Penagihan sebesar 13,739,578,837

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Th. 2020	Realisasi Th. 2021	Realisasi Th. 2022	Realisasi Th. 2023	Realisasi Th. Y
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)					100.85%

Sumber : Validasi Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Sidoarjo Utara Tahun 2020 s.d. 2023 dan Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Update 14 Januari 2025

Perbandingan realisasi kinerja lima tahun kebelakang IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara cenderung fluktuatif. Berdasarkan data pada tabel yang tersedia, kinerja IKU pada Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan hingga lima tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2020 tidak terdapat IKU yang secara spesifik memiliki nama dan formula perhitungan yang sama dengan tahun 2024. Sehingga kinerja penerimaan hanya bisa dibandingkan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun ini. Upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai kinerja pada tahun 2024 diantaranya adalah optimalisasi Komite Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara, melakukan analisis penggalan potensi berbasis sektoral, melakukan kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan analisis dengan PPNS Kantor Wilayah, dan penetapan DSP4 Kolaboratif yang berkualitas. Sehingga mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 100.85% dengan tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM sebesar 95,78%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Th 2024 dalam Renja DJP	Target Th 2024 dalam Renstra DJP	Target Th 2024 dalam RPJMN	Target Th 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa	100%	100%		100%	100.85%

Sumber : Dokumen Renstra dan Renja DJP, Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Triwulan IV Tahun 2024 Update 14 Januari 2025

Tercapainya target penerimaan pajak dari kegiatan PKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara Tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Pengolahan dan pemanfaatan data internal dan memfokuskan PKM pada wajib pajak yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak
2. Penyelarasan kebijakan perpajakan dengan kondisi ekonomi dan sektor bisnis tertentu membantu Wajib pajak memahami kewajibannya
3. Optimalisasi penyusunan bahan baku pemeriksaan, dengan melakukan pemantauan dan percepatan tindak lanjut LHP2DK Usul Pemeriksaan, memaksimalkan ruang pengusulan bahan baku yang dapat diusulkan tanpa melalui penelitian komprehensif atau menyeluruh

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material aktivitas pada setiap triwulan dengan menggunakan Menggunakan sistem risk profiling untuk memprioritaskan WP berisiko tinggi (high-risk taxpayers) dalam pelaksanaan PKM, sehingga usaha pengumpulan pajak lebih efisien dan berdampak signifikan
2. Menentukan target dan komitmen PKM Aktivitas per triwulan
3. Melaksanakan pendekatan personal kepada wajib pajak (one on one engagement) dimana KPP berusaha menjalin hubungan baik dengan memberikan perhatian khusus kepada wajib pajak dengan kontribusi besar melalui kunjungan/visit untuk membahas kewajiban perpajakan mereka
4. Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang dampak positif pembayaran pajak bagi pembangunan nasional dan melaksanakan edukasi berkelanjutan
5. Berkolaborasi dengan pemerintah daerah atau stakeholder terkait untuk memanfaatkan data seperti izin usaha, data aset, atau data perizinan lainnya
6. Optimalisasi pelaksanaan pemeriksaan melalui penguatan uji bukti untuk meningkatkan success rate

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PKM didukung oleh beberapa faktor penting, antara lain:

1. Pemilihan Prioritas yang Tepat: Fokus pada Wajib Pajak DSP4 yang memiliki potensi besar dan kemampuan membayar (ATP) yang tinggi, sehingga upaya yang dilakukan dapat memberikan hasil yang maksimal.
2. Kolaborasi yang Efektif: Kerjasama yang solid antara petugas pemeriksa, petugas penilai, dan Account Representative dalam menindaklanjuti Wajib Pajak DSP4, memastikan setiap langkah strategis terlaksana dengan baik.
3. Percepatan Penyelesaian Daftar Sasaran Prioritas: Penyelesaian yang lebih cepat atas daftar sasaran prioritas mampu mendorong realisasi penerimaan secara signifikan terhadap target yang telah ditetapkan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan langkah penting untuk memastikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan penerimaan pajak berjalan dengan optimal, efektif, dan efisien. Efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara dalam memastikan tercapainya target IKU Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) adalah sebagai berikut :

1. Melakukan analisis data dan mengidentifikasi sumber penerimaan yang dapat digunakan sebagai penggalan potensi dengan memaksimalkan aplikasi ataupun sistem informasi yang telah dimiliki Direktorat Jenderal Pajak
2. Minimalisasi biaya operasional yang tidak terkait langsung dengan penerimaan, seperti biaya transportasi atau dokumentasi manual.
3. Melaksanakan pengawasan internal terhadap prosedur pemeriksaan kepatuhan wajib pajak

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin. Dalam pelaksanaan money internal, masing masing aktor dan jajaran manajerial menyampaikan terkait capaian penerimaan pajak, kendala yang terjadi di lapangan, dan menentukan langkah perbaikan. Selain itu pemanfaatan Dashboard Kinerja Kantor Pelayanan Pajak juga dilaksanakan dengan baik untuk melakukan analisis dan identifikasi terkait penerimaan pajak secara real-time berdasarkan sektor, wilayah, atau jenis pajak.

Pelaksana program semacam ini menjadi wujud nyata pelaksanaan efisiensi sumber daya

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (money) atas capaian PKM yang tertuang dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara dilakukan secara rutin setiap triwulan. Kegiatan ini berfokus pada evaluasi capaian aktivitas PKM pada triwulan yang telah selesai sekaligus menetapkan target dan komitmen untuk triwulan yang sedang berjalan. Kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian kinerja PKM tahun 2024. Melalui monitoring dan evaluasi yang terarah dan berkesinambungan, diharapkan hasil yang dicapai dapat terus ditingkatkan dan memberikan kontribusi positif terhadap target yang telah ditetapkan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Mitigasi risiko yang telah disusun pada awal tahun dalam pencapaian kinerja tahun 2024 adalah melaksanakan Kegiatan Bedah Wajib Pajak dalam rangka pembahasan DPP, pemanfaatan data untuk penggalan potensi, pembahasan pengawasan sektoral, Pembahasan wajib pajak pra-SPHP, Penyusunan DSPC yang berkualitas, dan konseling dengan wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak terbesar.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala PKM :

1. Success rate yang rendah dari bahan baku pemeriksaan yang tersedia
2. Tunggakan pajak pada beberapa Wajib Pajak belum dapat dilunasi karena kondisi Wajib Pajak yang mengalami pailit, pembubaran, atau sudah tidak aktif. Hal ini menjadi perhatian untuk memastikan
3. penanganan yang sesuai dengan kondisi masing-masing Wajib Pajak. Data DPP (Daftar Prioritas Penagihan) rekomendasi yang diprediksi memiliki potensi besar, setelah dilakukan penelitian dan konfirmasi kepada wajib pajak, terkadang menunjukkan potensi yang lebih kecil dari perkiraan awal

Solusi :

1. Penyusunan bahan baku pemeriksaan melalui analisa mandiri dan Pembahasan Usulan Pemeriksaan Relevan Business Process
2. Selektif dalam penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPc) dengan mempertimbangkan wajib pajak yang memiliki ability to pay tinggi
3. Penyusunan data usulan DPP berdasarkan analisis mandiri yang lebih mendalam dan terfokus pada Wajib Pajak dengan potensi yang lebih pasti serta kondisi yang sudah terverifikasi dengan jelas.

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

1. Penyusunan DSP4 Adjustment dengan prioritas Wajib Pajak yang memiliki ability to pay tinggi.
2. Penyusunan DPP Mandatory dengan prioritas Wajib Pajak yang memiliki ability to pay tinggi.
Penerbitan Berita Acara Wider Revenue Activity atas wajib pajak
3. yang tidak termasuk dalam DSP4 tahun 2025
4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) setiap triwulan.

Internal Process Perspective
SS Edukasi dan pelayanan yang efektif
IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	8.33%	81.06%	81.06%	86.95%	86.95%	88%	88%
Capaian	83%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Update 14 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

• Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

- 1.Tema I – Meningkatkan Kesadaran Pajak
- 2.Tema II – Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
- 3.Tema III – Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo
- Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

• Formula IKU

$$\{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

• Realisasi IKU

Breakdown Penghitungan Capaian Unit Kerja

4344280000 - KPP Pratama Sidoarjo Utara

Kegiatan					Perubahan Perilaku				Rasio			Capaian IKU			
	Rencana	Realisasi (Input)	Realisasi (Output)	%		Target	Perubahan Perilaku	%		Capaian	Proporsi		Trajektori	Realisasi	
formal	4	4	4		Bayar	130	138	143,84%	Perubahan Perilaku	Kegiatan	100,00%	10,50%	Q1	10,00%	120,90%
Terdid	10	50	15		Lapor	150	191	127,34%		Bayar	143,84%	42,18%	Q2	40,00%	120,90%
Terdid					Σ Nominal Bayar				Lapor	127,34%	28,12%	Q3	60,00%	120,90%	
One to One	10	138	10		3.470.120.884,00				Total		89,86%	Q4	74,00%	120,90%	
One to Many	10	22	10												
Total	40	198	48	100,00%											

Sumber : Aplikasi Mandor Dashboard Capain Kinerja IKU Penyuluhan Update 14 Januari 2025

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara berhasil mendapatkan capaian 120% sejak Triwulan II Tahun 2024. Yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan edukasi, rasio perubahan perilaku lapor dan perubahan perilaku bayar dari wajib pajak berjalan sesuai dengan program atau rencana kerja yang telah disusun pada awal tahun.

Berdasarkan data pada aplikasi Mandor DJP update tanggal 14 Januari 2025, Realisasi Kegiatan Edukasi yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024 sebanyak 186 kegiatan dengan rincian (Tema-1 sebanyak 4 kegiatan, Tema-2 sebanyak 52 kegiatan, Tema-3 one to one 108 kegiatan, dan Tema-3 one to many sebanyak 22 kegiatan) dari target pelaksanaan sejumlah 40 kegiatan. Sebanyak 191 wajib pajak mengalami Perubahan Perilaku Lapor yakni dengan melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau SPT Tahunan yang telah jatuh tempo setelah kegiatan edukasi dilaksanakan. Sedangkan pada Perubahan Perilaku Bayar, tercatat 158 wajib pajak yang melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo; pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo; maupun melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan dengan total nominal pembayaran sebesar Rp470.126.684. Apabila disimpulkan berdasarkan tabel Capaian Kinerja IKU Penyuluhan, Kegiatan Edukasi mendapatkan capaian sebesar 100%, Perubahan Perilaku Lapor sebesar 173,64% dan Perubahan Perilaku Bayar sebesar 143,64%. Sehingga capaian akhir yang telah memperhitungkan proporsi sesuai dengan Formula Perhitungan IKU Penyuluhan pada Tahun 2024 adalah sebesar 120%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Th. 2020	Realisasi Th. 2021	Realisasi Th. 2022	Realisasi Th. 2023	Realisasi Th. Y
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan					88.80%

Sumber : Validasi Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Sidoarjo Utara Tahun 2020 s.d. 2023 dan Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Update 14 Januari 2025

Realisasi IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena pada IKU ini terdapat perubahan nama, cara perhitungan dan formula penghitungan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Realisasi pada tahun sebelumnya menyamakan besaran formula penghitungan pelaksanaan kegiatan edukasi dengan perubahan perilaku lapor. Pada tahun 2024, membuat proporsi lebih sesuai dan menitikberatkan pada perubahan perilaku lapor dan bayar wajib pajak.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
Nama IKU	Target Th 2024 dalam Renja DJP	Target Th 2024 dalam Renstra DJP	Target Th 2024 dalam RPJMN	Target Th 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan				74%	88.80%

Sumber : Dokumen Renstra dan Renja DJP, Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Triwulan IV Tahun 2024 Update 14 Januari 2025

Realisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara Tahun 2024 sebesar 88.80% dengan capaian 120%. Hal ini merupakan wujud dari keberhasilan atas kegiatan edukasi yang selama ini dilaksanakan. Yakni mengadakan kelas pajak dan sosialisasi secara rutin (baik didalam maupun diluar kantor) dan adanya kolaborasi antara Account Representative dan Fungsional Penyuluh saat pelaksanaan kegiatan.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Beberapa extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah :

1. Melakukan konsultasi di helpdesk dan menjalankan fungsi penggalian potensi secara bersamaan
2. Mengintegrasikan isu-isu yang sedang berkembang, seperti perubahan regulasi perpajakan atau kebijakan insentif pajak pada saat menyelenggarakan sosialisasi maupun kelas pajak sehingga materi lebih relevan dan menarik
3. Memanfaatkan media sosial (Instagram, TikTok, dan Twitter) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara untuk menyampaikan informasi perpajakan secara singkat, kreatif, dan menarik

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan dan peningkatan kinerja pada tahun 2024 berasal dari pelaksanaan edukasi dan sosialisasi yang efektif. Kegiatan edukasi dan sosialisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara dilaksanakan melalui berbagai media. Seperti kelas pajak (luring), siaran podcast, dan media social berhasil meningkatkan kesadaran wajib pajak. Selain itu, kegiatan penyuluhan selalu disesuaikan dengan segmentasi wajib pajak sehingga materi lebih mudah dipahami dan relevan dengan permasalahan mereka. Dampaknya wajib pajak menjadi lebih paham mengenai hak dan kewajibannya. Sehingga terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak (baik dalam pelaksanaan pelaporan maupun pembayaran) secara sukarela.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara adalah melakukan sinergi dengan pegawai yang memiliki tugas dan fungsi dalam meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran wajib pajak. Sehingga kegiatan edukasi dan sosialisasi terhadap wajib pajak tetap dapat dilaksanakan meskipun jumlah tenaga penyuluh terbatas.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang pencapaian kinerja adalah melakukan kegiatan edukasi sekaligus menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk wajib pajak melakukan pelaporan dan pembayaran.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Salah satu rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun adalah menggunakan data historis untuk mengidentifikasi kelompok wajib pajak yang memiliki tingkat kepatuhan rendah dan memberikan edukasi yang lebih intensif kepada mereka. Dengan data inilah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara bergerak untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan dengan tujuan memberikan pemahaman serta layanan terhadap kendala yang wajib pajak hadapi sehingga terjadi perubahan perilaku dalam pelaporan maupun pembayaran.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perubahan perilaku lapor dan bayar wajib pajak atas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah :

1. Kurangnya antusias wajib pajak dalam menghadiri himbauan sosialisasi daring
2. Wajib pajak yang menghadiri Sosialisasi daring tidak sepenuhnya menyerap materi perpajakan yang disampaikan oleh narasumber
3. Wajib pajak yang sudah berkomitmen untuk melakukan pembayaran pajak tetapi sampai dengan Wider Revenue Activiy daluarsa tidak melakukan pembayaran yang berakibat capaian Pengujian Kepatuhan Material Edukasi tidak dapat diprediksi secara akurat
4. Terjadi Keterlambatan dalam penginputan kegiatan sosialisasi pada aplikasi sisuluh
5. Terlalu banyak tahapan penginputan pada aplikasi sisuluh untuk dapat diakui sebagai realisasi (rangkaian Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan)

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan untuk mengatasi kendala adalah :

1. Merencanakan kegiatan edukasi di awal periode dan mengirimkan laporan kegiatan edukasi dan seluruh rangkaian Manajemen Pelaksanaan Kegiatan
2. Penyuluhan pada aplikasi sisuluh sebelum 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilaksanakan.
3. Melakukan survei pasca pelaksanaan untuk mengetahui efektivitas kegiatan edukasi dan perbaikan yang diperlukan.
4. Mengevaluasi dampak kegiatan edukasi terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, baik dalam hal pelaporan maupun pembayaran pajak.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Meningkatkan kualitas edukasi perpajakan
2. Memberikan pedoman yang lebih intensif kepada wajib pajak yang baru terdaftar untuk memastikan mereka memahami seluruh kewajiban perpajakan sejak awal
3. Menyenggarakan ruang edukasi di KPP dengan materi yang mudah dipahami, seperti video interaktif dan simulasi sistem pajak
4. Melakukan kolaborasi dengan stakeholder terkait untuk melakukan edukasi dan sosialisasi perpajakan

Internal Process Perspective
SS Edukasi dan pelayanan yang efektif
IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	10%	10%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	5.96%	12.24%	12.24%	20.04%	20.04%	111.48%	111.48%
Capaian	119%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Update 14 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

• Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.
4. Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

• Formula IKU

Indeks Hasil Survei

• Realisasi IKU

Berdasarkan nota dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II nomor ND-4057/WPJ.24/2024 tanggal 11 Desember 2024 hal Penyampaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan dan IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan Triwulan IV dan Tahunan Tahun 2024, Indeks capaian yang diperoleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara sebesar 111.48 dengan rincian Indeks Kepuasan Layanan sebesar 94.00 dan Indeks Efektivitas Penyuluhan sebesar 86.44. Dimana capaian ini menempati posisi terbaik kedua dalam ruang lingkup Kanwil DJP Jawa Timur II

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Th. 2020	Realisasi Th. 2021	Realisasi Th. 2022	Realisasi Th. 2023	Realisasi Th. Y
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan					111.48%

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor DJP Update 14 Januari 2025

Realisasi Iku Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan cara perhitungan dan formula penghitungan dengan tahun 2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
Nama IKU	Target Th 2024 dalam Renja DJP	Target Th 2024 dalam Renstra DJP	Target Th 2024 dalam RPJMN	Target Th 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks Kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan				74%	88.80%

Sumber : Dokumen Renja dan Renstra DJP, Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Sidoarjo Utara Tahun 2024, dan Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor DJP Tahun Update 14 Januari 2025

Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan yang diraih oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang diamanahkan dalam Renja-Renstra DJP. Realisasi 111,84% merupakan akumulasi dari hasil survei kepuasan pelayanan dan survei kepuasan penyuluhan yang diisi oleh wajib pajak dan diselenggarakan oleh Kantor Pusat DJP bekerja sama dengan pihak surveyor. Capaian kinerja ini menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara telah memberikan pelayanan dan edukasi yang baik bagi wajib pajak.

- #### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

 - Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Beberapa upaya extra effort yang dilaksanakan guna menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah :

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

1. Melayani dengan tulus dan cepat tanggap terhadap permasalahan wajib pajak
2. Melaksanakan kelas pajak dan sosialisasi dengan rutin, dan melakukan kolaborasi dengan stakeholder terkait dalam pelaksanaannya guna memperluas jangkauan penyuluhan dan meningkatkan fasilita kegiatan
3. Optimalisasi kanal digital dalam memberikan informasi perpajakan
4. Menyelenggarakan pelayanan dan penyuluhan diluar kantor saat dan diluar jam kerja
5. Melakukan pelatihan intensif untuk penyuluh pajak terkait komunikasi efektif, pemanfaatan teknologi, dan penguasaan materi regulasi terbaru

Dengan langkah-langkah extra effort ini, KPP tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan dan penyuluhan, tetapi juga memperluas jangkauan dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan Wajib Pajak. Hal ini akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Analisis terhadap penyebab keberhasilan kinerja yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara antara lain :

1. Membuat dan melaksanakan standar pelayanan dan maklumat pelayanan yang telah ditetapkan
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan janji layanan KPP Pratama Sidoarjo Utara (PASTI)
 - a. Profesional dalam bekerja
 - b. Akurat dalam memberikan informasi
 - c. Sopan dalam melayani
 - d. Terampil dan tepat waktu dalam memberikan pelayanan
 - e. Integritas dalam berkata dan berperilaku dengan mengutamakan kepuasan wajib pajak
3. Peningkatan kompetensi pegawai agar memiliki kemampuan komunikasi yang baik, pemahaman regulasi perpajakan yang mendalam, dan keterampilan problem-solving
4. Menyediakan lingkungan pelayanan wajib pajak yang nyaman, area pelayanan yang lengkap dan rapi, dan fasilitas modern dan fasilitas penunjang bagi kelompok rentan
5. Melakukan edukasi yang inklusif dan interaktif

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis terkait dengan efisiensi penggunaan sumber daya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara berusaha memaksimalkan potensi yang dimiliki. Diantaranya adalah :

1. Pemanfaatan lokasi tempat pelayanan terpadu yang luas dengan menyediakan fasilitas yang lengkap sehingga wajib pajak merasa nyaman
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi dan media sosial dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan penyampaian informasi terkini terkait perpajakan

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja tidak lepas dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini. Kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP adalah :

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara melaksanakan survei kepuasan wajib pajak untuk mengetahui kepuasan wajib pajak. Disamping itu digunakan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan dalam memberikan pelayanan
2. Mengevaluasi efektivitas penyuluhan berdasarkan tingkat pemahaman WP, partisipasi, dan kepatuhan setelah kegiatan berlangsung.
3. Penggunaan notifikasi otomatis melalui whatsapp blast atau email untuk mengingatkan Wajib pajak tentang tenggat waktu pelaporan dan pembayaran pajak.
4. Menyediakan saluran pengaduan bagi wajib pajak baik secara online (melalui kanal tertentu) dan offline (antrean khusus pada TPT) guna mengatasi keluhan atau masukan dari wajib pajak yang kemudian akan ditanggapi dengan cepat dan solutif.
5. Melakukan pendekatan proaktif dan persuasif. Melalui kunjungan secara khusus guna membahas kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang dianggap perlu untuk dilakukan pendekatan khusus.
6. Mengadakan program penghargaan bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan
7. Menciptakan sebuah inovasi dalam bentuk webpage dengan nama “Linda” (Layanan Integrasi KPP Pratama Sidoarjo Utara) guna menyebarluaskan informasi perpajakan kepada wajib pajak sekaligus sebagai sarana saluran pengaduan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi yang ditetapkan pada periode sebelumnya dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Dan terbukti mampu mendapatkan capaian kinerja melebihi dari target yang telah diamanahkan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara telah melakukan beberapa langkah solutif dalam mengatasi kendala yang ada. Diantaranya adalah :

1. Menyediakan loket layanan tambahan guna mengurangi lonjakan antrian di akhir pelaporan tahunan wajib pajak dan mempublikasi infografis pelaporan pajak lebih awal untuk mengurangi penumpukan pelaporan di akhir periode
2. Menyediakan materi edukasi dalam berbagai format, seperti video animasi, podcast, atau infografis sebagai sarana penyuluhan yang efektif dalam memberikan pemahaman terhadap wajib pajak
3. Melaksanakan penyuluhan persuasif yang menekankan pentingnya kepatuhan pajak untuk menghindari sanksi hukum
4. Melaksanakan kegiatan Transfer Of Knowledge di lingkungan internal guna membekali pegawai dengan pemahaman yang kuat terhadap regulasi pajak terbaru dan permasalahan relevan yang dihadapi oleh para wajib pajak
5. Mengadakan penyuluhan secara masif dengan berbagai bentuk, seperti seminar, webinar, atau workshop langsung di wilayah wajib pajak

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Sebagai strategi dalam menjaga sekaligus mengoptimalkan layanan dan penyuluhan terhadap wajib pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara menyusun beberapa rencana aksi untuk tahun selanjutnya

1. Peningkatan kompetensi berkelanjutan bagi pegawai. Agar memiliki kemampuan khusus dalam memberikan pelayanan terhadap wajib pajak, dan keterampilan dalam melakukan negosiasi

3. Melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan secara massif
4. Menyediakan layanan diluar kantor didalam maupun diluar jam kerja melalui kerjasama dengan instansi atau lembaga lain untuk mendirikan pos pelayanan pajak di lokasi strategis, seperti mal, kantor kecamatan, atau pusat komunitas

Rencana aksi ke depan ini bertujuan untuk memastikan layanan dan penyuluhan KPP lebih inklusif, efisien, dan proaktif. Dengan pendekatan berbasis teknologi, personalisasi edukasi, dan peningkatan kualitas SDM, KPP dapat terus meningkatkan kepuasan dan kepatuhan WP serta berkontribusi pada optimalisasi penerimaan pajak.

Internal Process Perspective

SS Persentase pengawasan pembayaran masa

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120%	120%	120%	110.56%	110.56%	119.23%	119.23%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Update 14 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

• Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis)

a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis)

a. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;

b. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;

- c. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
- d. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- e. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;

3) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis)

- a. adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan
- c. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- d. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

1) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti

- Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

2) Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi

- Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
- Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak. Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran

3) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan

- Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;

- **Formula IKU**

Persentase pengawasan pembayaran masa

$$(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$$

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis

$$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + ((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25} \times 30\%)) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$$

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

$$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + (((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\%) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$$

- **Realisasi IKU**

Unit Kerja	Target		Realisasi				Realisasi (%)
	Daftar STP	Target IKU	Daftar	Daftar Daftar	Total	Realisasi STP	
DIT. BANTAR WILAYAH DP (JAB. TIMUR)	61.762	61.762	61.762	12.437	61.762	413.414.028.668	100.00%
DIT. PERAMBAK KULIAH (JAB. TIMUR)	6.765	6.765	1.100	1.100	12.865	13.009.601.802	100.00%

Sumber : Dashboard Capaian Kinerja IKU Aktivitas PPM 2024 Rekapitulasi Daftar Nominatif STP

Dashboard | Dashboard STP | **Data Perpajakan** | Penambahan WP | Ditampilkan PPM 25 | Informasi dan Manual IKU

Data Perpajakan
Per Unit Kerja

Unit Kerja: Data update terakhir: 31-12-2024 00:00:00 WIB

Unit Kerja	Kuantitas			Kualitas			Rasio Rasio PPM % (25% Kuantitas + 75% Kualitas)
	Target	Realisasi	Realisasi%	Target	Realisasi	Realisasi%	
215 - KANTOR WILAYAH DIPONEGORO TUGAS 2	3.000	3.000	100.00%	3.000	3.000	100.00%	100.00%
242 - Kantor Wilayah Sidoarjo Utara	624	734	117.63%	624	620	99.36%	100.00%

Sumber : Dashboard Capaian Kinerja IKU Aktivitas PPM 2024 Rekapitulasi Tindak Lanjut Data Perpajakan

Dashboard

Dashboard STP

Data Perpajakan

Penambahan WP

Ditampilkan PPM 25

Informasi dan Manual IKU

Data Penambahan WP

Per Unit Kerja

Unit Kerja

Pilih

Data update terakhir: 07-01-2025 00:00:00 WIB

Kuantitas							Kualitas			Bobot Kuantitas (75%)	Bobot Kualitas (25%)	Rata-rata RCU	Capaian IKU (Rata-rata 100%)
LAPORAN OUTSTANDING			Target	Total Bobot Kuantitas	Realisasi%	Target	Realisasi	Realisasi%					
jumlah SPKESK	jumlah TL	Saldo											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	16.769	16.761	201.68	2.812	3.207.18	153.84%	966.89	1.000.00	100.00%	42.23%	132.23%	126.89%	
2	781	486	10.11	183	277.61	112.28%	71.84	76.00	105.00%	56.00%	140.00%	120.00%	

Sumber : Dashboard Capaian Kinerja IKU Aktivitas PPM 2024 Rekapitulasi Penambahan Wajib Pajak

Dashboard | Dashboard STP | **Data Perpajakan** | Penambahan WP | Ditampilkan PPM 25 | Informasi dan Manual IKU

Data Ditambahkan PPM Fisik 25
Per Unit Kerja

Unit Kerja: Data update terakhir: 04-01-2025 00:00:00 WIB

Unit Kerja	Kuantitas			Kualitas			Bobot Kuantitas (42%)	Bobot Kualitas (58%)	Realisasi IKU
	Target	Realisasi	Realisasi%	Target	Realisasi	Realisasi%			
215 - KANTOR WILAYAH DIPONEGORO TUGAS 2	312	346	110.90%	130	131	100.00%	44.78%	66.00%	110.29%
242 - Kantor Wilayah Sidoarjo Utara	12	12	100.00%	12	11	91.67%	51.67%	12.00%	114.58%

Sumber : Dashboard Capaian Kinerja IKU Aktivitas PPM 2024 Rekapitulasi Penambahan Wajib Pajak

Berdasarkan capaian kinerja yang tersaji dalam aplikasi mandor, pada IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa, capaian yang didapatkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Patama Sidoarjo Utara adalah 120%. Yang disokong dari kegiatan pengawasan pembayaran masa wajib pajak strategis dan pengawasan pembayaran wajib pajak lainnya. Kegiatan yang diakui sebagai aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa adalah penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), Penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25, Penambahan jumlah wajib pajak hasil ekstensifikasi yang dinilai dari penerbitan LHP2DKE, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan yang dilihat dari penerbitan LH2DK yang dilakukan terhadap wajib pajak strategis maupun kewilayahan

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Th. 2020	Realisasi Th. 2021	Realisasi Th. 2022	Realisasi Th. 2023	Realisasi Th. Y
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa					119.23%

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Update 14 Januari 2025

Realisasi IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa tidak dapat dibandingkan dengan kinerja lima tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perbedaan cara dan formula perhitungan dengan tahun 2024.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
Nama IKU	Target Th 2024 dalam Renja DJP	Target Th 2024 dalam Renstra DJP	Target Th 2024 dalam RPJMN	Target Th 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%		90%	119.23%

Sumber : Dokumen Renja-Renstar DJP, Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Tahun 2024, dan Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor DJP Update 14 Januari 2025

Realisasi yang berhasil dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara pada Tahun 2024 adalah 119,23% dengan capaian 120% jika dibandingkan dengan target yang diamanahkan dalam Renja-Renstra DJP sebesar 90%.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya extra effort sebagai penunjang keberhasilan pencapain kinerja antaia lain :

- 1. Menerbitkan STP sesuai daftar nominative
- 2. Menindaklanjuti Data pemicu rutin
- 3. Melakukan kegiatan pengumpulan data menggunakan aplikasi matoa
- 4. Melakukan monitoring dan evalusi triwulanan dengan Komite Kepatuhan
- 5. KPP
Melakukan Monitoring pembayaran wajib pajak bendahara melalui aplikasi
- 6. appportal dan OMSPAN
Monitoring setoran PPh Pasal 21 wajib pajak cabang dengan kategori
- 7. setoran PPh Pasal 21 terbesar
Kolaborasi antara seksi pengawasan dan seksi penjaminan kualitas data terkait setoran yang belum masuk sampai dengan bulan berakhir

• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Beberapa analisis keberhasilan atas capaian IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rutin triwulanan oleh Komite Kepatuhan KPP
- 2. Monitoring pembayaran wajib pajak bendahara melalui aplikasi appportal dan OMSPAN
Monitoring setoran PPh Pasal 21 wajib pajak cabang dengan kategori setoran PPh Pasal 21 terbesar

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya adalah menindaklanjuti daftar nominatif yang disampaikan oleh kantor pusat dalam rangka pelaksanaan penggalan potensi dan penegakan hukum kepada wajib pajak. Dengan adanya dafnom, pengawasan dapat difokuskan kepada wajib pajak yang memberikan kontribusi besar atau yang berisiko tinggi. Sehingga tidak ada pemborosan waktu yang dihabiskan untuk melakukan penggalan potensi kepada wajib pajak yang berdampak kecil terhadap penerimaan negara.

Selain itu, mengintegrasikan data dari berbagai sumber (internal dan eksternal) dapat mempercepat proses identifikasi wajib pajak yang perlu diawasi tanpa harus mencari informasi tambahan secara manual. Data yang akurat mengurangi risiko kesalahan dalam pengawasan, yang dapat menyebabkan pengulangan pekerjaan

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) atas capaian PPM yang tertuang dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara dilakukan secara rutin setiap triwulan. Kegiatan ini berfokus pada evaluasi capaian aktivitas PPM pada triwulan yang telah selesai, sekaligus menetapkan target dan komitmen untuk triwulan yang sedang berjalan. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian kinerja PPM tahun 2024. Melalui monitoring dan evaluasi yang terarah dan berkesinambungan, diharapkan hasil yang dicapai dapat terus ditingkatkan dan memberikan kontribusi positif terhadap target yang telah ditetapkan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Berikut adalah rencana aksi yang disusun guna memenuhi target pengawasan :

1. Menerbitkan STP Tahun berjalan
2. Menerbitkan SP2DK atas Data Matching Tahun berjalan
3. Melakukan penelitian Dinamisasi PPh Pasal 25
4. Menindak lanjuti Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) hasil kegiatan pengumpulan data

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Beberapa kendala yang dirasakan dalam pelaksanaan pemenuhan IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

1. Kondisi perekonomian wajib pajak yang fluktuatif dan mempengaruhi kemampuan untuk membayar tanggungan atau kewajiban perpajakannya
2. Aktivitas Impor dari wajib pajak importir yang tidak menentu
3. Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan ataupun konfirmasi terhadap upaya pengasan yang dilakukan (Tidak memberikan umpan balik terhadap pengiriman SP2DK maupun Surat Teguran Pajak)

Berikut langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mengatasi kendala yang ada :

1. Melakukan pendekatan kepada wajib pajak penentu penerimaan dengan setoran rutin terbesar
2. Berkoordinasi dengan wajib pajak importir terkait aktivitas impor yang sedang berjalan

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

1. Pengawasan atas wajib pajak penentu 95% penerimaan
2. Penerbitan STP (Surat Tagihan Pajak) atas daftar nominatif tahun berjalan
3. Tindak Lanjut Data Pemicu di aplikasi approweb dan/atau coretax tahun berjalan
4. Monev triwulanan atas setoran PPM oleh komite kepatuhan

Internal Process Perspective
SS Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif
IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	109.44%	109.44%	120%	120%
Capaian	120%	120%	120%	109.44%	109.44%	120%	120%

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Update 14 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

• Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Kuantitas (40%)

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%). Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

- 1) Jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan
 - LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
 - LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
 - LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
- 2) Jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

B. Komponen Kuantitas (60%)

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas. Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

- 1) Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
 - (a) dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
 - (b) usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:

- (i) pemeriksaan khusus data konkret;
- (ii) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
- (c) usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.

2) Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

• Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)

Capaian Penelitian (Maks 120%)

$$\frac{\text{Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024}}{\text{Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis}} \times 100\%$$

Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)

$$\frac{\text{Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis}}{\text{Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis}} \times 100\%$$

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Kualitas)

Capaian Kuantitas (Maks 120%)

(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)

Capaian Kualitas

$$\frac{\text{Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas}}{\text{Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas}} \times 100\%$$

• **Realisasi IKU**

Berdasarkan dashboard capaian kinerja organisasi pada aplikasi mandor djp, realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara sebesar 120% baik dari P4DK Strategis maupun P4DK Kewilayahan. Dimana capaian ini menandakan penyelesaian Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Komponen Penelitian maupun Komponen Tindak Lanjut terselesaikan dengan optimal. Capaian IKU P4DK Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara tahun 2024 berada diatas capaian P4DK Nasional sebesar 105.31%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Th. 2020	Realisasi Th. 2021	Realisasi Th. 2022	Realisasi Th. 2023	Realisasi Th. Y
Persentase Penyelesaian Permintaan atas Data dan/atau Keterangan					120%

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Update 14 Januari 2025

Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Permintaan atas Data dan/atau Keterangan tidak dapat dibandingkan dengan kinerja lima tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perbedaan cara perhitungan dan formula penghitungan dengan tahun 2024.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
Nama IKU	Target Th 2024 dalam Renja DJP	Target Th 2024 dalam Renstra DJP	Target Th 2024 dalam RPJMN	Target Th 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase Penyelesaian Permintaan atas Data dan/atau Keterangan	100%	100%		100%	120%

Sumber : Dokumen Renja dan Renstra DJP, Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Sidoarjo Utara Tahun 2024, dan Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor DJP Tahun Update 14 Januari 2025

Apabila dilakukan perbandingan realisasi kinerja IKU Persentase Penyelesaian Permintaan atas Data dan/atau Keterangan, pada tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara berhasil melebihi target yang telah diamankan dengan capaian 120%. Dimana capaian ini lebih tinggi daripada capaian Nasional sebesar 105.31%. Keberhasilan capaian kinerja didukung oleh beberapa faktor. Yaitu ketersediaan data yang lengkap dan berkualitas, kecakapan pegawai dalam memahami regulasi perpajakan dan sistem informasi DJP yang baik sehingga mampu mendatangkan analisa data yang akurat, dan responsivitas wajib pajak dalam merespon permintaan informasi maupun penjelasan atas data dan/atau keterangan yang disajikan.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berikut upaya extra effort yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara dalam mencapai keberhasilan pada IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Data dan/atau Keterangan pada tahun 2024 :

1. Pelaksanaan kegiatan bedah wajib pajak oleh Seksi Pengawasan atas wajib pajak yang termasuk dalam Daftar Prioritas Pengawasan
2. Kolaborasi antara Seksi Penjaminan Kualitas Data dan Seksi Pengawasan atas Daftar Prioritas Pengawasan yang belum LHPt dan/atau SP2DK belum LHP2DK secara berkala

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

3. Percepatan penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan Outstanding dan Daftar Prioritas Pengawasan yang telah ditetapkan di tahun 2024
4. Penerbitan Laporan Hasil Penelitian, SP2DK sampai dengan LHP2DK atas Data Pemicu tahun berjalan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

1. Penerbitan LHPt, SP2DK sampai dengan LHP2DK atas DPP yang telah ditetapkan setiap semester (DPP Kolaboratif)
2. Penerbitan LHPt, SP2DK sampai dengan LHP2DK atas DPP Mandatory data konkret dan usulan KPP
3. Penerbitan LHPt, SP2DK sampai dengan LHP2DK atas Data Pemicu tahun berjalan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Terkait dengan efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan capaian IKU Penyelesaian Permintaan atas Data dan/atau Keterangan pada tahun 2024 adalah Pengawasan internal terhadap penyelesaian permintaan data dan keterangan dan rutin melaksanakan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas proses. Disamping itu, pemanfaatan data yang telah terintegrasi dapat mempercepat dan memudahkan penyelesaian pekerjaan. Dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai dalam pengolahan data wajib pajak, KPP juga melaksanakan program In House Training penggunaan Power BI yang dapat digunakan untuk analisis data wajib pajak yang ada.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

1. Kolaborasi antara seksi penjaminan kualitas data dan seksi pengawasan atas DPP belum LHPt dan/atau SP2DK belum LHP2DK secara berkala
2. Percepatan penyelesaian DPP Outstanding dan DPP yang telah ditetapkan di tahun 2024
3. Pemetaan Data Internal (Pemicu, Penguji Prioritas, Apportal) yang dioptimalisasi pengayaan (enrichment) data eksternal melalui Sidut Data Analitika dan Monika, menjadikan Komite Kepatuhan lebih efektif

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi yang ditetapkan awal tahun sebagai langkah mitigasi dalam penyelesaian pekerjaan adalah

1. Melakukan kunjungan dan pendekatan yang baik terhadap wajib pajak dalam rangka melakukan konfirmasi atas data yang ditemukan
2. Kolaborasi antara Account Representative Strategis dan Fungsional Pemeriksa atas Wajib Pajak yang telah dilakukan pemeriksaan

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

Data Pemicu tahun berjalan dengan jenis tax gap terkadang menghasilkan potensi lebih kecil daripada potensi awal. Selain itu, kondisi Wajib Pajak yang menjadi DPP Rekomendasi terkadang tidak menentu (Wajib Pajak tidak ditemukan, Wajib Pajak dalam kondisi ekonomi yang menurun, Wajib Pajak tidak kooperatif).

Berikut langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi kendala:

1. Melakukan penelitian dan konfirmasi kepada wajib pajak terkait data pemicu yang muncul di aplikasi approweb
2. Melakukan kegiatan visit kepada wajib pajak yang termasuk DPP Rekomendasi terlebih dahulu sebelum mengusulkannya dalam DPP Adjustment dalam rangka memperlancar kegiatan pengawasan.
3. Berkoordinasi dengan petugas kecamatan, petugas desa/kelurahan, dan atau pengelola lokasi dari wajib pajak yang akan dilakukan visit

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

1. Penyusunan DPP agar lebih selektif dengan mengedepankan wajib pajak yang kooperatif, atp tinggi
2. Penelitian Data Pemicu dan Penguji atas wajib pajak DPP Rekomendasi
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala atas data DPP yang telah ditetapkan
4. Optimalisasi aplikasi Sidut Data Analitika yang memperkaya data internal dengan data eksternal (data Sikumbang, data OJK, webscrapping marketplase, faktur nol nol, dll)
5. Kerjasama intensif dengan KPP lain tempat pengelola pusat ekonomi terdaftar
6. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengamatan pada Account Representative yang lebih intensif dan terevaluasi

Internal Process Perspective

SS Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	116.49%	116.49%	116.63%	116.63%	119.73%	119.73%
Capaian	120%	116.49%	116.49%	116.63%	116.63%	119.73%	119.73%

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Update 14 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

• Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa; atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa),
- tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);

3. Atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
 4. Nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
 5. Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindak lanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
 - c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
 - d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data Matching

- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
 1. Memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 2. Memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
 3. Memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
 4. Tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
 5. Tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

1. Tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
2. Tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
3. Jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
4. Jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

b. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.

c. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.

d. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

• Formula IKU

$$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$$

Pemanfaatan Data STP :

$$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Pemanfaatan Data Matching :

$$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang seharusnya ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

• **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan pada tahun 2024 sebesar 119.73% berdasarkan Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor DJP Update 14 Januari 2024. Capaian ini berasal dari komponen Pemanfaatan Data STP dan Pemanfaatan Data Matching. Untuk pemanfaatan Data STP, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara berhasil menyelesaikan sejumlah 3.372 STP dari yang ditargetkan sebesar 2.828 STP dengan capaian 120% dan nominal pencairan STP sebesar Rp13.907.499.036. Sedangkan capaian dari Pemanfaatan Data Matching, berhasil diselesaikan sejumlah 2.231 data dari target 1.582. Sehingga menghasilkan capaian 120%

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Th. 2020	Realisasi Th. 2021	Realisasi Th. 2022	Realisasi Th. 2023	Realisasi Th. Y
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan					120%

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Update 14 Januari 2025

Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Permintaan atas Data dan/atau Keterangan tidak dapat dibandingkan dengan kinerja lima tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perbedaan cara perhitungan dan formula penghitungan dengan tahun 2024.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
Nama IKU	Target Th 2024 dalam Renja DJP	Target Th 2024 dalam Renstra DJP	Target Th 2024 dalam RPJMN	Target Th 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan				100%	119.73%

Sumber : Dokumen Renja dan Renstra DJP, Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Sidoarjo Utara Tahun 2024, dan Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor DJP Tahun Update 14 Januari 2025

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan Tahun 2024 yang berhasil diselesaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara sebesar 119.73%.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Analisis terhadap upaya extra effort yang telah dilakukan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja adalah

1. Penerbitan Surat Tagihan Pajak sesuai daftar nominative yang terdapat pada aplikasi approweb
2. Memeriksa daftar nominative STP secara berkala
3. Pemanfaatan data pemicu dan data konkret yang muncul pada aplikasi approweb
4. Segera menindak lanjuti data pemicu dan data konkret atas tahun Y-1 berupa usulan DPP adjustment KPP dan/atau usulan DPP Mandatory
5. Melakukan kegiatan visit ke lokasi wajib pajak dalam rangka konfirmasi terhadap data pemicu dan data konkret yang tersedia

• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Atas keberhasilan dalam pencapain kinerja, berikut analisis penyebab peningkatan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara :

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

1. Melakukan kolaborasi antara Account Representative, Fungsional Pemeriksa Pajak dan Penilai terkait wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan
 2. Kolaborasi antara KPP dan Kantor Wilayah terkait wajib pajak yang sedang dalam proses pemeriksaan bukti permulaan
 3. Melakukan penelitian data pemicu dan konfirmasi kepada wajib pajak setelah dan/atau sebelum penerbitan LHPt sampai dengan LHP2DK
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dirasakan dalam rangka pelaksanaan Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan adalah data pemicu dengan jenis perbandingan setoran per jenis pajak dengan SPT Tahunan terkadang setelah diverifikasi hanya menghasilkan potensi lebih kecil dari potensi awal yang muncul pada aplikasi approweb

Solusi yang dilakukan adalah melakukan analisis terhadap data historis yang ada dan melakukan kolaborasi dengan stakeholder terkait dalam rangka pengumpulan data dan informasi wajib pajak untuk dilakukan pengalihan potensi lebih dalam

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Penerbitan STP tepat waktu atas daftar nominatif yang diturunkan oleh kantor pusat
2. Mengadakan pelatihan teknis bagi pegawai terkait analisis data, penggunaan power BI, atau software analitik lainnya
3. Optimalisasi pemanfaatan data pihak ketiga untuk mendapatkan data yang lebih lengkap

Internal Process Perspective

SS Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	100.74%	100.74%	120%	120%
Capaian	120%	120%	120%	100.74%	100.74%	120%	120%

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Update 14 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

• Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

- Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Komponen 2

- Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Komponen 3

- Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

• Formula IKU

- Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
- Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor

- Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

$$\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$$

- Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan)

• Realisasi IKU

Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu berhasil diraih Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara dengan capaian akhir 120%. Capaian ini didukung dari 3 komponen. Yaitu pelaksanaan pelaporan tugas komite kepatuhan yang tepat waktu, persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan, dan kualitas pelaksanaan komite kepatuhan. Dimana dalam kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ini terdapat tiga fungsi utama yang mempengaruhi. Yaitu Fungsi Pengawasan yang berhasil memperoleh capaian sebesar 82.38%, Fungsi Pemeriksaan sebesar 103,40% dan Fungsi Penagihan sebesar 102.44%. Sehingga memperoleh capaian akhir sebesar 120% yang telah disahkan melalui nota dinas Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan nomor ND-90/PJ.08/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Penyampaian Realisasi Triwulan IV Tahun 2024 IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan KPP dan Kanwil DJP Tepat waktu

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Th. 2020	Realisasi Th. 2021	Realisasi Th. 2022	Realisasi Th. 2023	Realisasi Th. Y
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu					120%

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor DJP Update 14 Januari 2025

Realisasai IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya. Dikarenakan terdapat perbedaan cara perhitungan dan formula penghitungan pada tahun 2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
Nama IKU	Target Th 2024 dalam Renja DJP	Target Th 2024 dalam Renstra DJP	Target Th 2024 dalam RPJMN	Target Th 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu				100%	120%

Sumber : Dokumen Renja-Renstar DJP, Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Tahun 2024, dan Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor DJP Update 14 Januari 2025

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara berhasil memenuhi target IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dengan capaian 120% berkat optimalisasi yang dilakukan terhadap pengelolaan tugas dan fungsi komite kepatuhan pada KPP.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja, dilakukan monitoring dan evaluasi secara intensif terhadap penerimaan PPM dan PKM setiap triwulan, guna memastikan pencapaian target yang optimal, langkah strategis juga diambil dengan mempercepat penyelesaian kegiatan pemeriksaan, khususnya yang berkaitan dengan tahun pajak 2019 serta pemeriksaan dengan usia Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang telah melewati 8 bulan, demi mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan negara.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

Pelaksanaan Adjustment DSP4 di Semester I dan Semester II menghadapi tantangan yang cukup besar karena waktu yang relatif singkat. Dalam proses ekstensifikasi, beberapa calon wajib pajak yang terdaftar pada Daftar Sasaran Prioritas membutuhkan pendekatan yang lebih efektif untuk memastikan komunikasi yang optimal, termasuk saat kunjungan langsung untuk verifikasi data. Selain itu, pada Daftar Prioritas Pengawasan, ditemukan beberapa wajib pajak yang telah berpindah domisili, lokasi usaha telah berpindah, atau mengalami perubahan kondisi usaha. Hal ini memberikan peluang untuk memperkuat strategi pengawasan dan memastikan pendataan yang lebih akurat guna mendukung pencapaian target penerimaan pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dengan waktu pelaksanaan adjustment DSP4 yang terbatas, pengampu fungsi pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan mengoptimalkan proses dengan menerapkan prioritas berbasis kemampuan ability to pay wajib pajak yang diusulkan. Pemilihan calon wajib pajak dalam Daftar Sasaran Prioritas Ekstensifikasi dilakukan secara lebih selektif dengan mempertimbangkan jenis data, profil wajib pajak, termasuk jenis kelamin, serta hasil verifikasi data. Untuk meningkatkan akurasi dalam kegiatan visit, terutama ketika wajib pajak tidak ditemukan, dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak kelurahan, kecamatan, atau pengelola kompleks terkait, guna memastikan langkah yang lebih efektif dan terintegrasi.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Sumber Daya Manusia tahun 2024 berdasarkan KEP Pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak sejumlah 17 orang dengan komposisi 1 eselon III, 10 orang eselon IV, 2 orang Fungsional Pemeriksa dan 4 Pelaksana. Terhadap sumber daya yang ada, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo utara berkomitmen untuk melakukan optimalisasi tugas dan fungsi Komite Kepatuhan agar dapat menghasilkan capaian kinerja penerimaan dan kepatuhan yang baik bagi KPP.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Berbagai langkah strategis dilakukan untuk mempercepat penyelesaian DSP4 dan mengoptimalkan penerimaan dari setiap daftar sasaran prioritas. Upaya ini mencakup pemantauan ketat terhadap jangka waktu penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP), sekaligus melaksanakan kegiatan bedah wajib pajak melalui pengawasan strategis dengan metode komprehensif dan pengawasan wilayah secara menyeluruh.

Kolaborasi yang erat antara Account Representative, fungsional pemeriksa pajak, dan jurusita juga menjadi kunci dalam penyelesaian DPP DSP4, dengan melibatkan PPNS Kantor Wilayah jika diperlukan. Selain itu, untuk memperkuat bahan baku DPP Adjustment yang diusulkan oleh KPP, dilakukan pengamatan mendalam terhadap wajib pajak yang akan diusulkan pada Semester I dan II, memastikan usulan tersebut didukung oleh data yang akurat dan relevan. Langkah-langkah ini diharapkan mampu mendorong kinerja pengawasan yang lebih efektif dan berkelanjutan pada tahun 2025.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi yang disusun pada awal tahun yang terbukti memberikan dampak positif terhadap pencapaian kinerja salah satunya adalah penyusunan daftar sasaran prioritas pengamanan penerimaan pajak yang berkualitas

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

1. Melaksanakan kegiatan bedah wajib pajak (strategis komprehensif, dan kewilayahan secara menyeluruh) pada tahun yang akan datang
2. Kolaborasi antara Account Representative, Fungsional Pemeriksa Pajak dan Jurusita untuk penyelesaian DPP (dsp4), dan PPNS kanwil (2025)
3. Memperkuat bahan baku DPP Adjustment usulan KPP dengan cara melakukan kegiatan pengamatan terlebih dahulu atas wajib pajak yang akan diusulkan menjadi DPP di semester I dan II (2025)

Internal Process Perspective
SS Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif
IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Update 14 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

• Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

$$(\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) + (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%)$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara Tahun 2024 adalah 120%. Dimana capaian ini dipengaruhi dari komponen pemeriksaan (Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP; Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan; Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan; Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu; dan Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi) dan komponen penilaian (Penyelesaian Penilaian dan Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu)

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Th. 2020	Realisasi Th. 2021	Realisasi Th. 2022	Realisasi Th. 2023	Realisasi Th. Y
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian					120%

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor DJP Update 14 Januari 2025

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya. Dikarenakan terdapat perbedaan cara penghitungan dan formula perhitungan pada tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
Nama IKU	Target Th 2024 dalam Renja DJP	Target Th 2024 dalam Renstra DJP	Target Th 2024 dalam RPJMN	Target Th 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian				100%	120%

Sumber : Dokumen Renja-Renstar DJP, Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Tahun 2024, dan Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor DJP Update 14 Januari 2025

Pada tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara berhasil mencapai target yang telah diamanahkan pada awal tahun untuk IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian. Hal ini disebabkan oleh manajemen pemeriksaan dan penilaian yang terarah dan terukur selama tahun 2024.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- Upaya extra effort yang telah dilaksanakan dalam pencapaian kinerja:
 - 1.Pembahasan pra SPHP dengan tim pembahas untuk meningkatkan kualitas hasil temuan pemeriksaan
 - 2.Prioritas penyelesaian tunggakan pemeriksaan dengan kriteria atp yang tinggi dan signifikansi potensi

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Analisi penyebab keberhasilan dalam pelaksanaan kinerja pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara adalah jajaran Managerial senantiasa melakukan monitoring pemeriksaan untuk meminimalisir risiko keterlambatan penyelesaian pemeriksaan dan memastikan efektivitas kerja

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian yang berkualitas dan sebagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara memastikan bahwa Proses Pemeriksaan dan Penilaian yang dilakukan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditentukan. Untuk itu, pengawasan internal yang ketat dilakukan melalui Unit Kepatuhan Internal untuk mencegah penyimpangan, memastikan objektivitas dan transparansi dalam proses pemeriksaan.

Berkaitan dengan efektivitas sumber daya manusia yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian, treatment yang telah dilaksanakan adalah pelaksanaan Transfer Of Knowledge dan Sharing Session terhadap kompetensi pemeriksa pajak dalam melakukan analisis data keuangan, investigasi perpajakan, transfer pricing, forensik audit, dsb. dalam rangka pelaksanaan dan penyajian laporan pemeriksaan yang lebih komprehensif

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Beberapa program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah :

1. Menyusun bahan baku pemeriksaan yang berkualitas melalui analisa mandiri dan usulan pemeriksaan RBP
2. Melakukan audit surprise ke tempat usaha wajib pajak
3. Melakukan upaya persuasi kepada Wajib Pajak untuk melunasi ketetapan pajak
4. Penyelesaian dan pengujian pemeriksaan yang akurat dan efektif

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi terhadap penyelesaian program kerja pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi dalam pemilihan wajib pajak yang diperiksa. Dengan menggunakan analisis risiko berbasis data, digunakan untuk memilih wajib pajak yang terindikasi memiliki tingkat ketidakpatuhan tinggi

2. Meningkatkan kualitas dan kecepatan dalam penyelesaian proses pemeriksaan
3. Meningkatkan komunikasi yang transparan dengan Wajib Pajak mengenai dasar hukum dan tujuan pemeriksaan penilaian
4. Memanfaatkan dashboard monitoring kinerja pemeriksaan untuk melacak progress secara real-time dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas strategi pemeriksana yang dilaksanakan

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proses pemeriksaan dan penilaian adalah bahan baku pemeriksaan yang berpotensi pada rendahnya succces rate. Ditambah dengan wajib pajak yang tidak kooperatif dalam memberikan data maupun dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan. Dalam proses penilaian, sering kali menghadapi kesulitan dalam menentukan nilai wajar yang objektif. Dan fluktuasi pasar dapat mempengaruhi nilai yang ditetapkan, sehingga dapat menimbulkan sengketa dengan WP.

Solusi yang telah diambil untuk mengatasi kendala adalah melakukan kolaborasi dengan Tim Penyidik dan Penilai Kantor Wilayah dalam pelaksanaan proses pemeriksaan maupun penilaian. Selain itu menggunakan analisis risiko berbasis data untuk menyeleksi Wajib Pajak yang memiliki potensi ketidakpatuhan tinggi dan menerapkan sistem profiling wajib pajak berdasarkan sektor industri, pola transaksi, dan histori kepatuhan pajak.

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

1. Analisa mandiri oleh Fungsional Pemeriksa Pajak dalam penyusunan bahan baku pemeriksaan
2. Melakukan pembahasan pra SPHP dengan tim pembahas
3. Optimalisasi kegiatan penilaian dalam kegiatan pemeriksaan
4. Melakukan edukasi kepada Wajib Pajak dalam proses pemeriksaan terkait konsekuensi ketidakkooperatifan Wajib Pajak
5. Inventarisasi asset Wajib Pajak dan penanggung pajak untuk mendukung kegiatan penagihan aktif
6. Implementasi focus audit dan pemeriksaan atas WP sektoral dan grup/potensi transfer pricing

Internal Process Perspective
SS Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif
IKU Tingkat efektivitas penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	39.98%	120%	120%	120%	120%	117.81%	117.81%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Update 14 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

• Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

1. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi: a. Penerbitan Surat Teguran; b. Pemberitahuan Surat Paksa; c. Pemblokiran; d. Penyitaan; dan e. Penjualan Barang Sitaan. Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	$(\text{Realisasi Surat Teguran} / \text{Target Surat Teguran}) \times 100\%$	19%
2	Surat Paksa	$(\text{Realisasi Surat Paksa} / \text{Target Surat Paksa}) \times 100\%$	29%
3	Penyitaan	$(\text{Realisasi Penyitaan} / \text{Target Penyitaan}) \times 100\%$	8%
4	Pemblokiran	$(\text{Realisasi Pemblokiran} / \text{Target Pemblokiran}) \times 100\%$	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	$(\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan} / \text{Target Penjualan Barang Sitaan}) \times 100\%$	16%
Jumlah			100%

Variabel Tindakan Penagihan :

$(\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan})$

2. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Variabel tindak lanjut DSPC (20%) Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan. Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Variabel Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC :

$$\frac{\text{Realisasi Tindak Lanjut DSPC}}{\text{Target Tindak Lanjut DSPC}} \times 100\%$$

3. Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC. Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak. Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Variabel Pencairan DSPC:

$$\frac{\text{Realisasi Pencairan DSPC}}{\text{Target Pencairan DSPC}} \times 100\%$$

- **Formula IKU**

Formula IKU Tahun 2024 :

$$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi Efektivitas Pengihan adalah akumulasi dari capaian variable tindakan penagihan, tindak lanjut DSPC, dan variable pencairan DSPC yang diperoleh sampai dengan tahun 2024. Realisasi kinerja yang berhasil dilampaui oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara adalah sebesar 117,81% dengan capaian 120% dibandingkan dengan target.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Th. 2020	Realisasi Th. 2021	Realisasi Th. 2022	Realisasi Th. 2023	Realisasi Th. Y
Tingkat Efektivitas Penagihan					119.23%

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Update 14 Januari 2025

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya. Dikarenakan terdapat perbedaan cara perhitungan dan formula penghitungan pada tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Th 2024 dalam Renja DJP	Target Th 2024 dalam Renstra DJP	Target Th 2024 dalam RPJMN	Target Th 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Tingkat Efektivitas Penagihan				100%	117.81%

Sumber : Dokumen Renja-Renstar DJP, Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Tahun 2024, dan Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor DJP Update 14 Januari 2025

Kinerja IKU Efektivitas Penagihan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 yang berhasil diraih oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara sebesar 117,81% dengan capaian 120% dari target yang ditetapkan. Hal ini terjadi akibat penegakan hukum yang dilakukan lebih efektif dan proaktif

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 1. Kolaborasi dengan tim kantor wilayah dan kantor pusat serta DJBC dalam melakukan penagihan aktif terhadap Wajib Pajak dengan
 2. tunggakan besar atau yang terkait dengan joint collection
 3. Koordinasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam rangka blokir Mengingatn wajib pajak yang memilih metode pelunasan
 4. tunggakan pajak menggunakan angsuran
Konseling Wajib Pajak dengan kategori penunggak pajak terbesar
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 1. Kegiatan pengawasan terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan besar dan memilih opsi untuk mengangsur dengan nominal angsuran wajar
 2. Mengingatn wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak besar secara berkala melalui kanal whatsapp
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Penggunaan anggaran surat paksa secara maksimal dalam rangka mendukung kegiatan penagihan aktif oleh jurusita.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 1. Melakukan kegiatan penagihan aktif melalui blokir rekening Wajib Pajak dan penanggung pajak
 2. Melakukan sita rekening Wajib Pajak dan penanggung pajak
 3. Melakukan sita dan lelang asset Wajib Pajak
 4. Melakukan blokir dan sita serentak

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

1. Penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan yang berkualitas
2. Melakukan rangkaian penagihan aktif dalam koridor waktu yang telah ditentukan
3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian DSPC tiap triwulan

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala

1. Masih terdapat daftar Wajib Pajak dengan ATP rendah, pailit, bubar dan tidak aktif yang masuk dalam DSPC
2. Terdapat Wajib Pajak pindahan KPP lain yang sudah hampir daluarsa penagihan
3. Keterbatasan tracing asset Wajib Pajak dan penanggung pajak yang dapat dijadikan obyek sita

Solusi

Menyusun DSPC secara efektif dan selektif

1. Melakukan usul penghapusan tunggakan pajak berkala atas kohir yang telah daluarsa penagihan, khususnya atas WP pindahan dari KPP lain
2. Kolaborasi dengan Kanwil dan Kantor Pusat dalam melakukan tracing asset Wajib Pajak dan penanggung pajak
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penagihan aktif

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

1. Penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan yang berkualitas
2. Melakukan rangkaian penagihan aktif dalam koridor waktu yang telah ditentukan
3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian DSPC tiap triwulan

Internal Process Perspective
SS Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif
IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
Capaian	0%	0%	0%	120%	120%	100%	100%

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Update 14 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

• Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

• Realisasi IKU

Realisasi IKU Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan yang berhasil diraih oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara Tahun 2024 adalah 100%. Dimana usul pemeriksaan bukti permulaan disampaikan sebanyak satu usulan sesuai dengan target yang ditetapkan

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Th. 2020	Realisasi Th. 2021	Realisasi Th. 2022	Realisasi Th. 2023	Realisasi Th. Y
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan					119.23%

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Update 14 Januari 2025

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya. Dikarenakan terdapat perbedaan cara perhitungan dan formula penghitungan pada tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Th 2024 dalam Renja DJP	Target Th 2024 dalam Renstra DJP	Target Th 2024 dalam RPJMN	Target Th 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan				100%	117.81%

Sumber : Dokumen Renja-Renstra DJP Tahun 2024, Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara Tahun 2024, Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor update 14 Januari 2025

Target yang telah ditetapkan berhasil dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara pada tahun 2024. Hal ini tidak lepas dari beberapa faktor pendukung, yakni ketersediaan data yang lengkap dan berkualitas dalam melakukan proses pemeriksaan, kolaborasi antar Tim Pemeriksaan, Intelijen, dan Penegakan Hukum Pajak pada Kantor Wilayah DJP untuk memastikan penyusunan usulan Bukper sesuai dengan standar hukum dan teknis yang berlaku dan mempercepat eskalasi kasus dengan bukti yang kuat, dan optimalisasi dalam pelaksanaan uji kepatuhan material wajib pajak

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya ekstra yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja melibatkan beberapa langkah strategis, seperti melakukan pengumpulan data yang mendalam dan analisa yang lebih teliti. Selain itu, dilakukan pengamatan terhadap wajib pajak yang akan diusulkan untuk pemeriksaan bukti permulaan, serta pengajuan usulan secara aktif ke kantor wilayah untuk mempercepat proses pengawasan. Tidak hanya itu, pembahasan bersama PPNS Kanwil juga dilakukan untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan bukti permulaan yang diajukan. Semua upaya ini berkontribusi besar dalam mempercepat proses pemeriksaan bukti permulaan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja ini disebabkan oleh serangkaian upaya yang terstruktur, mulai dari pengumpulan data yang mendalam hingga koordinasi aktif dengan kantor wilayah. Pengumpulan data yang lebih rinci memungkinkan analisa yang lebih akurat, yang pada gilirannya memperkuat keputusan terkait pemeriksaan wajib pajak. Pengamatan terhadap wajib pajak yang akan diusulkan untuk pemeriksaan bukti permulaan, ditambah dengan pengajuan usulan yang proaktif ke kantor wilayah, turut mempercepat proses pengawasan dan pemeriksaan. Selain itu, koordinasi yang intensif dengan kantor wilayah mengenai pemenuhan data yang diperlukan juga memastikan kelancaran dan kelengkapan proses usulan pemeriksaan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Terkait efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah pemanfaatan teknologi dalam identifikasi penyusunan buper. Memanfaatkan data yang terintegrasi dapat mempercepat analisis kepatuhan wajib pajak. Selain itu, efisiensi dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan Kantor Wilayah untuk berbagi sumber daya dan tenaga ahli dalam kasus tertentu.

Efisiensi juga dapat dilakukan melalui Fokus pada Wajib pajak dengan risiko tinggi (high-risk taxpayers) yang memiliki potensi pelanggaran signifikan. Yang didapat dari integrasi hasil pengujian kepatuhan material atau lebih banyak menggunakan inspeksi berbasis digital daripada pemeriksaan lapangan. Sehingga dapat menghemat pembiayaan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Koordinasi yang efektif dengan kantor wilayah memainkan peran penting dalam keberhasilan pencapaian kinerja terkait usulan pemeriksaan bukti permulaan. Koordinasi ini memastikan bahwa data yang diperlukan dapat dipenuhi secara tepat waktu, mempercepat proses usulan pemeriksaan, dan mendukung kelancaran pengawasan. Keberhasilan pencapaian kinerja sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang diterima dari kantor wilayah.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang disusun pada periode sebelumnya telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian kinerja. Langkah pertama, yaitu pengumpulan data dan analisa mendalam, memastikan bahwa keputusan yang diambil berbasis data yang akurat dan lengkap. Selanjutnya, pengamatan terhadap wajib pajak yang akan diusulkan untuk pemeriksaan bukti permulaan telah memungkinkan identifikasi yang lebih tepat terhadap wajib pajak yang berisiko, mempercepat proses pemeriksaan. Pengajuan usulan secara aktif ke kantor wilayah juga membantu mempercepat prosedur dan memastikan bahwa setiap langkah dilakukan secara proaktif. Terakhir, koordinasi dengan kantor wilayah terkait pemenuhan data yang diperlukan untuk usulan pemeriksaan bukti permulaan memperlancar kelengkapan data dan mempercepat pengambilan keputusan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya bahan yang dapat diajukan untuk usulan pemeriksaan bukti permulaan, yang sering kali tidak memenuhi semua unsur yang dibutuhkan. Untuk mengatasi hal ini, langkah-langkah yang diambil antara lain melakukan pengumpulan data dan analisa yang mendalam menggunakan data yang telah tersedia, sehingga dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan relevan. Selain itu, melakukan pengamatan terhadap wajib pajak yang akan diusulkan untuk pemeriksaan bukti permulaan membantu memastikan bahwa wajib pajak yang dipilih benar-benar memenuhi kriteria yang ditetapkan.

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Mencari data dan membuat daftar prioritas Wajib Pajak yang diindikasikan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan melakukan komunikasi secara aktif dengan Kantor Wilayah terkait dengan Wajib Pajak yang diusulkan untuk pemeriksaan bukti permulaan

Internal Process Perspective

SS Data dan informasi yang berkualitas

IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	108.12%	120%	120%	120%
Capaian	120%	120%	120%	108.12%	120%	120%	120%

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Update 14 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

• Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahu isasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

- **Formula IKU**

1. **Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan**

$$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$$

2. **Persentase penyediaan data potensi perpajakan**

$$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$$

Realisasi IKU Tahun 2024 :

$$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan disokong melalui dua aktivitas. Yakno pelaksanaan kegiatan pengamatan dan kegiatan pengumpulan data lapangan. Pada tahun 2024, berdasarkan data dari aplikasi Mandor DJP untuk Capaian Kinerja Dashboard KPDL dan Alket, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara berhasil menyediakan data potensi perpajakan melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan sebanyak 2.921 data dari target yang hanya berjumlah 1.541. Dengan demikian, capaian penyediaan data potensi perpajakan adalah sebesar 120%. Untuk kegiatan pengamatan sendiri, setiap KPP mendapatkan target pelaksanaan sejumlah empat kegiatan. Dan KPP Pratama Sidoarjo Utara berhasil melaksanakan kegiatan pengamatan sebanyak 6 kegiatan sehingga menghasilkan capaian 120%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Th. 2020	Realisasi Th. 2021	Realisasi Th. 2022	Realisasi Th. 2023	Realisasi Th. Y
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan				100%	120%

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Update 14 Januari 2025

Realisasi IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tidak bisa dibandingkan dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya. Dikarenakan terdapat perbedaan cara perhitungan dan formula penghitungan pada tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Th 2024 dalam Renja DJP	Target Th 2024 dalam Renstra DJP	Target Th 2024 dalam RPJMN	Target Th 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan				100%	120%

Sumber : Dokumen Renja-Renstra DJP Tahun 2024, Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara Tahun 2024, Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor update 14 Januari 2025

Pada Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara berhasil mendapatkan realisasi sebesar 120% pada IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan dalam capaian kinerja meliputi pengelolaan data yang efektif, optimalisasi sumber daya, serta pemanfaatan teknologi yang tepat

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya ekstra yang mendukung pencapaian kinerja dalam penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan meliputi beberapa langkah strategis. Pembagian target pengamatan, dengan minimal satu laporan per seksi pengawasan, memastikan setiap seksi bertanggung jawab atas penyelesaian laporan. Selain itu, pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengamatan pada Account Representative meningkatkan pemahaman tim dalam menyusun laporan pengamatan. Bimtek pengumpulan data melalui aplikasi MATOA juga dilakukan untuk mempermudah kegiatan pengumpulan data secara digital. Semua langkah ini berkontribusi dalam peningkatan efektivitas penyelesaian laporan dan penyediaan data potensi perpajakan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Minimnya petugas pengamat dalam unit menjadi tantangan untuk pemenuhan laporan pengamatan, tetapi hal tersebut tidak menghalangi unit untuk dapat mencapai target pengamatan yang telah diamanatkan. Hal tersebut terbukti dengan diadakannya kegiatan bimbingan teknis kepada Account Representative oleh petugas pengamat dalam unit sehingga seluruh Account Representative mendapatkan kompetensi untuk melakukan kegiatan pengamatan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya salah satunya adalah pemanfaatan aplikasi Matoa dalam pelaksanaan kegiatan pengamatan dan pengumpulan data lapangan. Disamping itu, optimalisasi penggunaan Aplikasi Monika dapat menjadi alternatif dalam efisiensi sumber daya. Monika sendiri merupakan inovasi yang dimiliki KPP Pratama Sidoarjo Utara yang bertujuan untuk melakukan monitoring data dan kinerja KPP meliputi dashboard pengawasan atas wajib pajak 95% penentu penerimaan, spreadsheet prognosa yang diupdate secara berkala (per bulan), dashboard kepatuhan SPT KPP, monitoring kegiatan pengawasan dan penyajian berbagai data oleh seksi penjaminan kualitas data

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Bimtek kegiatan pengamatan dengan peserta Account Representative menjadi kunci dalam unit mencapai target pengamatan. Dan unit menjadi KPP piloting untuk kegiatan KPD melalui aplikasi MATOA menjadikan unit memiliki pengalaman lebih dahulu dalam melaksanakan kegiatan KPD MATOA

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Berbagai rencana aksi dan langkah mitigasi risiko dilaksanakan untuk memastikan pencapaian kinerja yang optimal dalam pengumpulan data dan pengamatan. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, serta kemampuan petugas dalam menjalankan tugas pengamatan dan pengumpulan data dengan lebih baik. Berikut adalah analisis singkat mengenai pelaksanaan rencana aksi yang telah dilakukan:

1. Pembagian Target Pengamatan dengan cara meningkatkan fokus dan mempercepat penyelesaian laporan dengan menetapkan target minimal satu laporan per seksi Pengawasan.
2. Pelaksanaan Bimtek Pengamatan pada Account Representative dengan cara memberikan pemahaman yang lebih baik kepada petugas agar pengamatan dapat dilakukan sesuai standar.
3. Pelaksanaan Bimtek Pengumpulan Data melalui aplikasi MATOA dengan tujuan untuk mempercepat dan mempermudah pengumpulan data di lapangan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam menghadapi kendala minimnya petugas pengamat di lingkungan KPP, langkah adaptasi yang diambil telah memberikan dampak positif. Untuk mengatasi keterbatasan petugas, KPP fokus pada optimalisasi proses pengumpulan data melalui metode yang lebih efisien dan praktis. Sebagai bagian dari upaya ini, pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) dilaksanakan untuk memberikan pelatihan terkait kegiatan pengamatan dan kegiatan pengumpulan data melalui aplikasi mobile. Bimtek ini bertujuan agar petugas dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif dan akurat

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

- Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengamatan pada Account Representative, Fungsional Pemeriksa, Jurusita Pajak Negara, dan pelaksana verifikator Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara intensif.
- Pembagian target pengamatan pada seksi Pengawasan dan seksi Pemeriksaan, Penagihan, dan Penilaian (termasuk Fungsional Pemeriksa)
- Optimalisasi pemanfaatan data yang sudah tersedia untuk memperkaya bahan pengamatan.

Internal Process Perspective

SS Data dan informasi yang berkualitas

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	7.67%	45.67%	45.67%	87.58%	87.59%	88.55	88.55%
Capaian	76.70%	120%	120%	108.12%	120%	120%	120%

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Update 14 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

• Definisi IKU

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

- Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi
- Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- **Formula IKU**

$$\begin{aligned}
 & \left[70\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] \\
 & + \\
 & \left[30\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]
 \end{aligned}$$

- **Realisasi IKU**

Berdasarkan nota dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II nomor ND-30/WPJ.24/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal Pemenuhan IKU Penghimpunan Data Regional dari ILAP Triwulan IV Tahun 2024, realisasi IKU yang berhasil diraih oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara adalah 88.50% dengan capaian 120% bila dibandingkan dengan target. Dengan jumlah data yang berhasil terhimpun sebanyak lima data dengan jenis data utama dan tiga data dengan jenis data lainnya.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Th. 2020	Realisasi Th. 2021	Realisasi Th. 2022	Realisasi Th. 2023	Realisasi Th. Y
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP					88.50%

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Update 14 Januari 2025

Realisasi IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tidak bisa dibandingkan dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya. Dikarenakan terdapat perbedaan cara perhitungan dan formula penghitungan pada tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
Nama IKU	Target Th 2024 dalam Renja DJP	Target Th 2024 dalam Renstra DJP	Target Th 2024 dalam RPJMN	Target Th 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP				55%	88.50%

Sumber : Dokumen Renja-Renstra DJP Tahun 2024, Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara Tahun 2024, Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor update 14 Januari 2025

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara berhasil mencapai target yang telah diamanahkan pada IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP untuk tahun 2024. Dari target sebesar 55%, realisasi pada tahun 2024 sebesar 88.50%. Langkah konkrit yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja adalah melakukan kolaborasi dengan KPP lainnya sebagai pengampu IKU Penghimpunan Data Regional di Sidoarjo, Menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan stakeholder terkait, dan melakukan Komunikasi kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait dengan penyetoran pajak yang dilakukan oleh bendahara desa

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja dalam pengelolaan data dan penyetoran pajak tidak lepas dari upaya-upaya ekstra yang dilakukan oleh KPP Pratama di wilayah Sidoarjo. Salah satu upaya kunci adalah kolaborasi yang intensif antara KPP Pratama Sidoarjo Utara, Sidoarjo Selatan, dan Sidoarjo Barat dalam meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Sidoarjo. Melalui sinergi ini, proses pertukaran informasi terkait data pajak dan administrasi perpajakan menjadi lebih lancar dan efisien, mengurangi hambatan dalam komunikasi serta mempercepat pemenuhan kebutuhan data.

Selain itu, langkah ekstra lainnya adalah melakukan komunikasi aktif dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) terkait penyetoran pajak yang dilakukan oleh bendahara desa. Upaya ini bertujuan untuk memperluas cakupan data warehouse KPP, sehingga semakin banyak data yang dapat digunakan untuk analisis perpajakan dan kebijakan fiskal. Dengan mengoptimalkan data dari tingkat desa, KPP dapat memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan fiskal di daerah tersebut.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Kolaborasi yang erat antara KPP, Kantor Wilayah, dan Pemerintah Daerah telah memberikan dampak positif dalam pemenuhan data ILAP. Melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS), mekanisme pertukaran data menjadi lebih jelas, sementara usulan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB) semakin memperkuat sinergi dalam pengawasan. Meskipun masih terdapat tantangan seperti responsivitas Pemerintah Daerah yang perlu ditingkatkan dan ketidaklengkapan data yang disampaikan. Dengan upaya ini, diharapkan pemenuhan data ILAP dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi terkait penggunaan sumber daya salah satunya dengan penyederhaan dan standardisasi proses pengumpulan data ILAP. Yakni dengan menerapkan prosedur standar (SOP) yang lebih ringkas dalam pengumpulan data ILAP agar proses lebih cepat dan tidak berulang, mengurangi birokrasi dalam akses data dengan menetapkan jalur komunikasi yang lebih cepat antarunit kerja sehingga dapat meminimalisir biaya operasional dan penggunaan waktu kurang efektif, dan mengadakan perjanjian kerja sama dengan lembaga terkait untuk memperoleh akses data yang lebih luas dan akurat.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan forum group discussion yang diadakan kantor wilayah dengan peserta KPP yang ada di wilayah kerja kanwil dan seluruh pemerintah daerah di bawah wilayah kerja kanwil guna menyelaraskan opini dan sudut pandang terkait permintaan data ILAP sangat membantu dalam pemenuhan data ILAP dari pemerintah daerah dan pembahasan isi dari perjanjian kerja sama (PKS).

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Dalam upaya meningkatkan pencapaian kinerja, berbagai rencana aksi dan langkah mitigasi risiko telah disusun dan diterapkan pada periode sebelumnya. Salah satu fokus utama adalah pemenuhan kelengkapan data ILAP melalui sinergi antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Wilayah, dan Pemerintah Daerah.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam menghadapi kendala minimnya petugas pengamat di lingkungan KPP, langkah adaptasi yang diambil telah memberikan dampak positif. Untuk mengatasi keterbatasan petugas, KPP fokus pada optimalisasi proses pengumpulan data melalui metode yang lebih efisien dan praktis. Sebagai bagian dari upaya ini, pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) dilaksanakan untuk memberikan pelatihan terkait kegiatan pengamatan dan kegiatan pengumpulan data melalui aplikasi mobile. Bimtek ini bertujuan agar petugas dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif dan akurat

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Untuk meningkatkan efektivitas pemenuhan data ILAP dan mengatasi kendala yang masih dihadapi, rencana aksi di tahun selanjutnya difokuskan pada peningkatan koordinasi dan optimalisasi pertukaran data dengan berbagai pihak terkait. Berikut langkah-langkah strategis yang akan dilakukan:

- Melakukan Konfirmasi dengan KPP Pengampu Data ILAP
- Berkoordinasi dengan Pemilik Data ILAP di Pemerintah Daerah atau Instansi Terkait dengan cara Meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi pemilik data ILAP untuk mempercepat respons dalam pemenuhan permintaan data.

Learning & Growth Perspective

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	110.15%	110.15%	108.23%	108.23%	117.23%	117.23%
Capaian	120%	110.15%	110.15%	108.23%	108.23%	117.23%	117.23%

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Update 14 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

- Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)
Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

- **Formula IKU**

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM :

$$(Capaian\ Komponen\ 1 \times 50\%) + (Capaian\ Komponen\ 2 \times 50\%)$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebingtalan SDM merupakan akumulasi dari kegiatan pengukuran kualitas kompetensi SDM dan pelaksana kegiatan kebingtalan. Untuk kegiatan pengukuran kualitas kompetensi SDM, terdapat 2 komponen utama yang dijadikan dasar perhitungan realisasi. Yakni Kualitas Kompetensi dan Pengembangan Potensi Pegawai. Dimana capaian yang berhasil diraih KPP Pratama Sidoarjo Utara dalam memastikan kualitas kompetensi pegawai adalah sebesar 100%. Terbukti dari jumlah pegawai yang dinyatakan lulus seluruhnya dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis. Baik dalam jabatan stuktural maupun jabatan fungsional. Untuk komponen Pengembangan Potensi Pegawai, berdasarkan monitoring capaian jamlat pada aplikasi Sikka DJP, KPP Pratama Sidoarjo Utara berhasil memperoleh capaian sebesar 108,62%. Pada komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM, pada tahun 2024 tercapai sebesar 120%. Sehingga apabila diakumulasikan, realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM adalah sebesar 117,23%

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Th. 2020	Realisasi Th. 2021	Realisasi Th. 2022	Realisasi Th. 2023	Realisasi Th. Y
Persentase Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kebintalan SDM					117.23%

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Update 14 Januari 2025

Realisasi IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tidak bisa dibandingkan dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya. Dikarenakan terdapat perbedaan cara perhitungan dan formula penghitungan pada tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
Nama IKU	Target Th 2024 dalam Renja DJP	Target Th 2024 dalam Renstra DJP	Target Th 2024 dalam RPJMN	Target Th 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kebintalan SDM				55%	88.50%

Sumber : Dokumen Renja-Renstra DJP Tahun 2024, Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara Tahun 2024, Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor update 14 Januari 2025

Capaian IKU Persentase Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kebintalan SDM tercapai 117,23% dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Keberhasilan dalam pelaksanaan kebintalan pegawaidan peningkatan kompetensi SDM pada KPP Sidoarjo Utara sangat bergantung pada kombinasi program pembinaan mental, pelatihan teknis, penguatan soft skills, serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya upaya extra effort yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan capaian kinerja adalah :

1. Pelaksanaan pelatihan maupun bimbingan teknis dalam meningkatkan kompetensi pegawai dalam bidang apapun
2. Inventaris data kebutuhan pelatihan pegawai untuk ditindaklanjuti dengan permohonan atau pendaftaran mengikuti diklat dalam meningkatkan skill dan pemahaman pegawai
3. Mengadakan learning class bagi pegawai internal KPP yang akan mengikuti Uji Kompetensi Teknis

4. Melaksanakan program penguatan mental dan motivasi rutin setiap bulan sekali
 5. Pelaksanaan kajian etika, moralitas, dan spiritualitas untuk memperkuat integritas pegawai
 6. Mengadakan team building dan program kebersamaan dalam rangka meningkatkan kekompakan dan hubungan positif antar pegawai
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Penyebab keberhasilan dalam pencapaian kinerja khususnya pada pelaksanaan program kebintalan dan peningkatan kualitas kompetensi pegawai tidak lepas dari komitmen dan dukungan pimpinan untuk turut memastikan bahwa kegiatan kebintalan yang diselenggarakan dan pengembangan SDM diterapkan secara konsisten dan terarah. Pimpinan yang aktif mendukung dan melaksanakan program yang telah dicanangkan, menumbuhkan lingkungan kerja yang kondusif bagi pertumbuhan pegawai. Selain itu, pelaksanaan coaching-mentoring berkelanjutan dan monitoring evaluasi terhadap pengembangan SDM juga menjadi sebab keberhasilan dalam pencapaian kinerja.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi terkait dengan penggunaan sumber daya dalam peningkatan kompetensi pegawai dan pelaksanaan program kebintalan adalah :

1. Memastikan pelaksanaan pelatihan berbasis kebutuhan. Sehingga sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
2. Pemanfaatan e-learning dan Learning Management System (LMS) yang dimiliki DJP ataupun Kemenkeu untuk memberikan akses pelatihan yang lebih fleksibel dan hemat anggaran

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 1. Pelaksanaan program kebintalan secara rutin guna membangun karakter pegawai yang berintegritas, professional, dan berorientasi pada pelayanan Peningkatan kompetensi manajerial dan soft skills diantaranya adalah Program
 2. pengembangan kepemimpinan bagi pegawai dengan potensi promosi jabatan, peningkatan keterampilan dalam komunikasi dengan Wajib Pajak, stakeholder, dan antarpegawai dan teknik negosiasi efektif dalam penyelesaian sengketa pajak, pelatihan public speaking dan penyuluhan pajak
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 1. Melaksanakan kelas bimbingan terhadap para pegawai yang akan melaksanakan uji kompetensi
 2. Melakukan monitoring secara periodik terhadap kegiatan e-learning
 3. Melaksankan IHT sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman terhadap Kode Etik, Aturan Perpajakan, dll
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi :

- Kurangan pemahaman dari beberapa pegawai terkait urgensi pelaksanaan program kebintalan dalam membentuk integritas dan profesionalisme dalam bekerja
- Pegawai memiliki banyak tugas operasional, sehingga sulit meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pembelajaran online (e-learning)
- Perbedaan tingkat pemahaman dan kompetensi antar pegawai membuat program pelatihan kurang efektif bagi kelompok tertentu

Solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi masalah :

- Meningkatkan metode penyampaian dengan pendekatan interaktif seperti diskusi kasus, role-playing, dan simulasi etika kerja
- Pelatihan berbasis level kompetensi, di mana pegawai dikelompokkan berdasarkan tingkat pemahaman mereka
- Mentorship dan coaching antarpegawai agar pegawai senior dapat berbagi pengalaman dengan pegawai baru

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

- Penguatan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (Competency-Based Training)
- Optimalisasi Pembelajaran Digital dan E-Learning
- Peningkatan Pelatihan Teknis dan Soft Skills
- Penguatan Program Mentorship dan Coaching Antar Pegawai
- Evaluasi dan Monitoring Kinerja Pasca-Pelatihan dan pelaksanaan program kebintalan
- Menyediakan sarana dan prasarana sebagai bahan baku pendukung peningkatan kompetensi pegawai

Learning & Growth Perspective

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target				85	85	85	85
Realisasi				100.00	100.00	93.93	93.93
Capaian				117.56%	117.56%	110.51%	110.51%

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Update 14 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

• Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan perpajakan;
2. Pengawasan kepatuhan;
3. Pemeriksaan pajak;
4. Penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

• Formula IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM :

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

• Realisasi IKU

Pada IKU Indeks Integritas Unit, yang terdiri dari 4 (empat) poin yaitu indeks pelayanan perpajakan, indeks pengawasan kepatuhan, indeks pemeriksaan pajak, dan indeks penagihan pajak, realisasi yang diraih adalah sebesar 93.93.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Th. 2020	Realisasi Th. 2021	Realisasi Th. 2022	Realisasi Th. 2023	Realisasi Th. Y
Indeks Penilaian Integritas Unit					93.93

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Update 14 Januari 2025

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perbedaan cara perhitungan dan formula penghitungan pada tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Th 2024 dalam Renja DJP	Target Th 2024 dalam Renstra DJP	Target Th 2024 dalam RPJMN	Target Th 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit				85.00	93.93

Sumber : Dokumen Renja-Renstra DJP Tahun 2024, Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara Tahun 2024, Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor update 14 Januari 2025

Terkait target dan realisasi pada IKU Indeks Penilaian Integritas Unit, KPP Pratama Sidoarjo Utara sebesar 93.93 dengan capaian 110.51

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

1. Mengoptimalkan sistem pengaduan yang efektif untuk memantau dan menangani aduan dari stakeholder
2. Melakukan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan
3. kesadaran dan kemampuan pegawai
Melakukan pengawasan dan pengendalian internal yang efektif untuk
4. mencegah dan mendeteksi pelanggaran integritas
Meningkatkan komunikasi yang efektif dengan pegawai, stakeholder, dan Wajib Pajak

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

1. Proaktif memantau capaian realisasi SPIU
2. Proaktif dalam berkomunikasi dengan Wajib Pajak yang menjadi responden SPIU

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

1. SDM

Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas dilakukan oleh KPK. KPP Pratama Sidoarjo Utara telah berkoordinasi dengan seluruh BoD dalam penentuan responden untuk komponen Pengawasan kepatuhan; Pemeriksaan pajak; Penagihan pajak. Sedangkan untuk komponen pelayanan diambilkan dari data responden untuk Survei Kepuasan Pelayanan dan Survei Efektivitas Kehumasan yang dilaksanakan secara terpusat pada Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

2. Anggaran

Teknis pelaksanaan Survei Penilaian Integritas dilakukan oleh KPK melalui frontier secara daring dengan mengirimkan pesan massal (blast) via WhatsApp blast dari akun bercentang hijau dan email resmi yang mengarahkan ke situs web spi.kpk.go.id. KPK juga menyediakan sarana memonitor capaian perolehan responden yang sudah mengisi SPI pada website resminya. Pada internal DJP, koordinasi dengan unit lokus sampel SPI 2024 dilakukan melalui Nota Dinas dan Jaringan Komunikasi WhatsApp, publikasi juga dilakukan secara online melalui desktop sehingga memaksimalkan efisiensi anggaran.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

1. Selalu melayani dengan hati, agar menimbulkan kesan yang baik kepada stakeholder
2. Selalu menanamkan integritas, sehingga tidak terdapat praktik gratifikasi dalam pertemuan dengan Wajib Pajak

- **Kerja sama dengan stakeholder untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan integritas**

1. Membangun komunikasi yang terbuka dan transparan dengan stakeholder
2. Menerima dan menanggapi umpan balik dari stakeholder
3. Mengadakan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan stakeholder, seperti: kelas pajak, penyuluhan melalui media online dan offline, dll
4. Mengembangkan kerja sama dengan instansi lain untuk mendukung integritas

- **Sosialisasi antikorupsi ke eksternal/stakeholder**

Telah diadakan sosialisasi antikorupsi internal di lingkungan KPP Pratama Sidoarjo Utara pada tanggal 28 Mei 2024 yang dipimpin oleh Kepala Kantor dan sosialisasi antikorupsi eksternal di lingkungan KPP Pratama Sidoarjo Utara pada tanggal 26 Juni 2024 terhadap Pengusaha dengan Peredaran Bruto Tertentu

- **Pengawasan dan pengendalian eksternal yang efektif untuk memastikan integritas**

1. Mengembangkan mekanisme pengawasan oleh masyarakat, seperti forum sosialisasi dan pertemuan publik, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas
2. Mengembangkan kultur organisasi yang mendukung integritas, transparansi, dan akuntabilitas
3. Menindaklanjuti adanya audit oleh BPK, ITJEN, KITSDA

- **Pengembangan budaya organisasi yang mendukung integritas dan transparansi**

1. Selalu menanamkan nilai-nilai Kementerian Keuangan
2. Mengadakan komunikasi terbuka dan transparansi antara pegawai, pimpinan, dan stakeholder, seperti: PEKA (Pimpinan Efektif, Kolaboratif, dan Aspiratif)
3. Mengembangkan kapasitas pegawai melalui pelatihan
4. Mengoptimalkan fungsi UKI secara berkala

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

1. Memantau secara realisasi atas capaian SPIU melalui kemenkeu sharepoint
2. Melaporkan secara berkala kepada Kepala Kantor kondisi capaian realisasi;
3. Menghubungi Wajib Pajak melalui actor masing-masing untuk mengingatkan atas pengisian survei yang masuk ke email pribadi responden;
4. Menambahkan responden tambahan untuk komponen yang belum tercapai

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Kendala yang dihadapi: Banyaknya survei yang tidak masuk ke email Wajib Pajak; Rendahnya penilaian integritas DJP di sudut pandang stakeholder yang mungkin selama ini belum sepenuhnya tereduksi mengenai upaya-upaya DJP dalam menjaga integritas.

1. Public campaign penguatan integritas/anti korupsi melalui kanal internal maupun eksternal DJP;
2. Diseminasi Hasil SPI 2024 melalui situs pajak atau media social kantor;
3. Instruksi kepada seluruh pegawai untuk mengerjakan modul KEKP pada portal pembelajaran jarak jauh internal StudiA. ;
4. Pelaksanaan beragam In-House Training (IHT) dan penguatan integritas, di antaranya workshop Unit Kepatuhan Internal (UKI);

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Mempertimbangkan capaian tahun 2024 atas IKU Indeks Penilaian Integritas Unit, maka disusun beberapa rencana aksi untuk dilaksanakan pada tahun 2025, di antaranya peningkatan koordinasi dengan KITSDA dan peningkatan kapasitas responden dalam hal pengalaman dan pengetahuan integritas.

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%
Realisasi	25.11%	46.59%	46.59%	72%	72%	99.01%	99.01%
Capaian	120%	99.13%	99.13%	102.86%	102.86%	110.01%	110.01%

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Update 14 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

• Definisi IKU

a. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

• **Formula IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

• **Realisasi IKU**

Realisasi yang berhasil dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara pada tahun 2024 sebesar 99.01% dengan capaian 110.01% dibandingkan dengan target. Realisasi ini berasal dari Implementasi Manajemen Kinerja sebesar 49.51% dan Manajemen Risiko yang sebesar 49.50%

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Th. 2020	Realisasi Th. 2021	Realisasi Th. 2022	Realisasi Th. 2023	Realisasi Th. Y
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko					99.01%

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Update 14 Januari 2025

Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya. Dikarenakan ada perbedaan cara perhitungan dan formula penghitungan pada tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
Nama IKU	Target Th 2024 dalam Renja DJP	Target Th 2024 dalam Renstra DJP	Target Th 2024 dalam RPJMN	Target Th 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko				90%	99.01%

Sumber : Dokumen Renja-Renstra DJP Tahun 2024, Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara Tahun 2024, Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor update 14 Januari 2025

Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko yang berhasil dicapai oleh KPP Pratama Sidoarjo Utara adalah 99.01%. Kemudahan dalam implementasi ini dipengaruhi oleh Budaya Kementerian Keuangan yang telah mengakar pada insan Kementerian Keuangan

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 1. Memastikan pelaksanaan imbauan manajemen kinerja organisasi sesuai dengan format dan timeline pelaksanaan
 2. Memastikan administrasi penyampaian laporan mitigasi risiko dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan format dan tepat waktu

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Penyebab keberhasilan implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko tidak lepas dari peran serta Pimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Diperkuat dengan komitmen seluruh pegawai untuk melaksanakan rencana aksi yang ditetapkan sebagai mitigasi terhadap kejadian risiko yang ada.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Terkait efisiensi penggunaan sumber daya, upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara dalam pelaksanaan Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko adalah :

an Pelayanan dan Survei Efektivitas Kehumasan yang dilaksanakan secara terpusat pada Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi imbauan kinerja sekaligus dengan pelaksanaan motivasi bulanan. Sehingga mampu menghemat anggaran dan tetap dapat memberikan dorongan positif bagi pegawai untuk dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Dengan adanya semangat yang tinggi, mampu mendorong pegawai untuk bekerja lebih efisien dan fokus pada pencapaian target
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pada level manajerial secara rutin untuk memastikan rencana aksi yang telah ditetapkan pada awal tahun berjalan sesuai harapan sekaligus mampu menciptakan sebuah strategi baru yang efektif apabila ditemukan kendala yang tidak terprediksi sebelumnya
3. Untuk mendapatkan hasil capaian yang optimal, KPP menetapkan timeline pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi sesuai dengan pedoman yang telah diberikan Kantor Pusat. Dan memastikan kelengkapan dokumen dan administrasi pelaporan sesuai dengan format yang telah tersedia

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Untuk menganalisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, langkah yang telah dilaksanakan adalah memahami dengan jelas tujuan dari program atau kegiatan tersebut. Dan menetapkan Indikator kinerja secara jelas dan terukur agar membantu dalam melakukan penilaian apakah kegiatan atau program tersebut berhasil atau tidak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

1. Melaksanakan rapat pembinaan secara rutin
2. Monitoring Nilai Kinerja Organisasi disisipkan saat Rapat Pembinaan
3. Sosialisasi Manajemen Kinerja

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

1. Kendala yang dihadapi adalah masih adanya seksi-seksi yang terlambat dalam
2. mengumpulkan berkas dan bukti-bukti pendukung juga tidak lengkap dimana
3. waktunya sudah mendekati tenggat waktu.

Aplikasi periskop yang terkadang down saat diakses,

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut yakni:

- Mengirimkan Nota Dinas pemberitahuan ke seksi-seksi agar mengumpulkan berkas yang diminta sesuai dengan tenggat waktunya.
- Segera mengoreksi ketika seksi-seksi terkait sudah mengirimkan berkas, jika ada kekurangan langsung diminta berkas yang lebih sesuai.
- Segera mengunggah ke aplikasi periskop sebelum aplikasi periskop tersebut sulit diakses.

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

- Melaksanakan sosialisasi manajemen kinerja dengan massif dan optimal
- Melakukan rapat pembinaan secara rutin untuk membahas rencana aksi yang telah ditetapkan sebelumnya
- Memperhatikan timeline dalam pelaksanaan kegiatan dan administrasi pelaporan manajemen kinerja organisasi dan risiko

Learning & Growth Perspective

SS Pengelolaan keuangan yang akuntabel

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	105.26%	105.22%	105.22%	120%	120%	120%	120%
Capaian	105.26%	105.22%	105.22%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Update 14 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

• Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi.

Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- **Formula IKU**

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

Formula Tw I, dan II
Realisasi IKPA/95,0

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA $\geq 98,00$
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15$ ($95 < x < 98$)
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5$ ($85 < x < 95$)
80	Realisasi IKPA = 85
79.9	Realisasi IKPA < 85

***Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)**
 $= (98-95) / (120-100)$

**** Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)**
 $= (95-85) / (100-80)$

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA $\geq$ 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55^{**}$ ($80 < x < 91$)
80	Realisasi NKA = 80
79.9	Realisasi NKA < 80

* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA) / (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)
= (95-91) / (120-100)

** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80) / (indeks capaian target – indeks capaian 80)
= (91-80) / (100-80)

• Formula IKU

Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran KPP Pratama Sidoarjo Utara s.d triwulan IV tahun 2024 tercapai sebesar 99.94 dengan capaian sebesar 120% dari target awal tahun. Realisasi di triwulan I dan triwulan II tidak dapat mencapai angka maksimal sebesar 120% karena penyerapan belanja pegawai khususnya uang lembur di triwulan I dan triwulan II masih rendah.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Th. 2020	Realisasi Th. 2021	Realisasi Th. 2022	Realisasi Th. 2023	Realisasi Th. Y
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	98.6%	96.10%	88.57%	95.6%	120%

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor Update 14 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama tiga tahun berturut-turut. Adanya peningkatan capaian realisasi indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran yang signifikan di tahun 2024 adalah karena adanya perubahan formula IKU, dimana di tahun 2024 tidak ada lagi terkait efisiensi anggaran. Dengan adanya perubahan formula IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran di tahun 2024, upaya yang telah dilakukan dan solusi agar tercapainya target tersebut adalah :

- Dengan melakukan perencanaan keuangan yang lebih matang
- Monitoring dan evaluasi yang rutin serta berkelanjutan atas RPD (Rencana Penarikan Dana) untuk setiap bulannya
- Penyerapan anggaran semaksimal mungkin untuk semua jenis belanja, baik belanja pegawai, belanja barang maupun belanja modal
- Melakukan revisi anggaran atas jenis-jenis anggaran yang perlu dilakukan revisi .

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
Nama IKU	Target Th 2024 dalam Renja DJP	Target Th 2024 dalam Renstra DJP	Target Th 2024 dalam RPJMN	Target Th 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%	100%		100%	120%

Sumber : Dokumen Renja-Renstra DJP Tahun 2024, Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara Tahun 2024, Dashboard Kinerja Organisasi Aplikasi Mandor update 14 Januari 2025

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran antara lain sebagai berikut :

1. Perencanaan keuangan yang lebih matang
2. Monitoring dan evaluasi yang rutin serta berkelanjutan atas RPD (Rencana Penarikan Dana) untuk setiap bulannya
3. Penyerapan anggaran semaksimal mungkin untuk semua jenis belanja, baik belanja pegawai, belanja barang maupun belanja modal
4. Melakukan revisi anggaran atas jenis-jenis anggaran yang perlu dilakukan revisi
5. Koordinasi yang lebih intens dengan stakeholder khususnya KPPN

• **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Realisasi capaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama tiga tahun berturut-turut. Adanya peningkatan capaian realisasi indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran yang signifikan di tahun 2024 adalah karena adanya perubahan formula IKU, dimana di tahun 2024 tidak ada lagi terkait efisiensi anggaran. Dengan adanya perubahan formula IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran di tahun 2024, upaya yang telah dilakukan dan solusi agar tercapainya target tersebut adalah :

1. Optimalisasi penyerapan anggaran untuk semua jenis belanja
2. Monitoring dan evaluasi atas RPD (Rencana Penarikan Dana)
3. Revisi anggaran untuk mengamankan penyerapan anggaran

• **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya yang ada pada KPP Pratama Sidoarjo Utara. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Revisi anggaran atas beberapa jenis anggaran yang perlu dikurangi seperti uang lembur pegawai
2. Penggunaan barang-barang yang bersifat ramah lingkungan seperti tumbler, piring non plastik, pemilahan sampah, dsb
3. Peniadaan minuman kemasan diganti dengan tumbler isi ulang
4. Optimalisasi dan efisiensi pengelolaan anggaran di semua jenis belanja

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil dari program/rencana kerja yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Sidoarjo Utara selama tahun 2024. Program/rencana kerja yang telah dilaksanakan antara lain :

- Perencanaan keuangan yang lebih matang
- Monitoring dan evaluasi yang rutin serta berkelanjutan atas RPD (Rencana Penarikan Dana) untuk setiap bulannya
- Penyerapan anggaran semaksimal mungkin untuk semua jenis belanja, baik belanja pegawai, belanja barang maupun belanja modal
- Melakukan revisi anggaran atas jenis-jenis anggaran yang perlu dilakukan revisi
- Koordinasi yang lebih intens dengan stakeholder khususnya KPPN

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:

- Revisi anggaran atas beberapa jenis anggaran yang perlu dikurangi seperti uang lembur pegawai
- Optimalisasi dan efisiensi pengelolaan anggaran di semua jenis belanja

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Kendala yang dihadapi adalah adanya beberapa komponen anggaran yang diperkirakan tidak akan terserap maksimal, yang dapat menghambat efektivitas penggunaan anggaran secara keseluruhan. Untuk mengatasi hal ini, langkah yang diambil adalah melakukan revisi anggaran guna realokasi komponen anggaran yang tidak terpakai ke komponen lain yang lebih mendesak atau membutuhkan dana lebih besar.

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

- Merencanakan dan mengevaluasi penyusunan anggaran agar dapat terlaksana dengan baik
- Merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran agar lebih terkontrol pada setiap aspek dan komponen IKPA sehingga dapat memaksimalkan setiap komponen
- Mengusulkan untuk kinerja penyerapan anggaran dapat terkontrol pada setiap triwulannya

REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan anggaran pada ruang lingkup Kementerian Keuangan dilaksanakan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

Berdasarkan data dari Laporan Ketersediaan Dana Detail Tahun Anggaran yang berasal dari Aplikasi Sakti, Realisasi Penyerapan DIPA KPP Pratama Sidoarjo Utara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.652.896.361 dengan capaian 99.62% dari pagu anggaran akhir2024 sebesar Rp6.678.330.000. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan KPP Pratama Sidoarjo Utara dapat digolongkan menjadi tiga jenis belanja. Yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Berdasarkan data online monitoring SPAN (OMSPAN) per 31 Desember 2024, didapat realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.057.718.000 (99.12% dari pagu sebesar Rp1.067.153.000), belanja barang sebesar Rp5.230.545.361 (99.88% dari pagu sebesar Rp5.236.810.000), dan belanja modal sebesar Rp364.633.000 (97.40% dari pagu sebesar Rp374.367.000).

Pada Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, KPP Pratama Sidoarjo Utara Tahun melaksanakan 5 kegiatan utama. Berikut realisasi DIPA atas kegiatan yan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024:

<u>Nama Kegiatan</u>	<u>Pagu Akhir 2024</u>	<u>Realisasi 2024</u>	<u>Capaian (%)</u>
<u>Ekstensifikasi Penerimaan</u> Negara	Rp489,074,000	Rp488,138,793	99.81%
<u>Pelayanan Komunikasi, dan</u> <u>Edukasi</u>	Rp306,471,000	Rp305,676,896	99.74%

Nama Kegiatan	Pagu Akhir 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
<u>Pengawasan dan Penegakan Hukum</u>	Rp351,521,000	Rp351,395,421	99.96%
<u>Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum</u>	Rp4,464,111,000	Rp4,449,967,251	99.68 %
<u>Pengelolaan Organisasi dan SDM</u>	Rp1,067,153,000	Rp1,057,718,000	99.12%
Total	Rp6,678,330,000	Rp6,652,896,361	99.62%

Sumber : Laporan Ketersediaan Dana Detail TA 2024 Aplikasi Sakti Per 31 Desember 2024

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel diatas, pagu anggaran terbesar pada kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan umum sebesar 99.68%. Dalam kegiatan ini, terdapat layanan dukungan teknis manajemen internal seperti Kerumahtanggaan; Penyediaan Layanan Perkantoran; dan Layanan Sarana Prasarana Internal. Dari besaran pagu yang ditetapkan, anggaran masih tersisa sebesar Rp14,143,749

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya adalah upaya untuk menggunakan sumber daya secara optimal sehingga menghasilkan output maksimal dengan pemborosan seminimal mungkin. Sebagai upaya dalam pencapaian IKU yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara dalam efisiensi Penggunaan Sumber Daya diantaranya adalah :

1. Menyusun kebutuhan anggaran berdasarkan data dan analisis kebutuhan yang akurat
2. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran untuk memastikan efisiensi tetap terjaga dan sesuai dengan rencana awal
3. Optimalisasi dalam pengelolaan sumber daya manusia yang ada. Dengan memberikan pembekalan kemampuan teknis maupun soft skills dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dan lebih menekankan pada kegiatan pembekalan yang dilakukan melalui media online daripada tatap muka

4. Efisiensi dalam penggunaan dan pemanfaatan asset/BMN yang dimiliki. Dengan cara rutin melakukan pemeliharaan berkala pada gedung, fasilitas pendukung layanan, peralatan kantor, dan kendaraan dinas operasional
5. Optimalisasi dalam pemanfaatan sumber data yang ada. Dengan cara memanfaatkan data perpajakan secara optimal untuk meningkatkan kepatuhan pajak, mengurangi kebocoran penerimaan negara, serta mempermudah administrasi pajak dengan biaya dan waktu yang minimal
6. Mengoptimalkan dan melakukan evaluasi terhadap inovasi-inovasi yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas

EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi internal yang dilakukan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara antara lain :

1. Melakukan rapat pembinaan secara rutin
2. Melakukan coaching dan mentoring kepada pegawai yang membutuhkan
3. Melakukan Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA) secara seksama atas proses bisnis yang telah ditentukan
4. Melakukan Pemantauan atas Penegakan Integritas dan Nilai Etika (PPINE) atas pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku pegawai
5. Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) atas rekomendasi BPK, Itjen, dan KITSDA
6. Melakukan penilaian atas Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) untuk memastikan kecukupan rancangan dan efektivitas pengendalian dalam mendukung keandalan pelaporan keuangan
7. Melakukan review implementasi Manajemen Risiko untuk menilai kesesuaian penerapan dengan ketentuan manajemen risiko, kesesuaian rencana dengan pelaksanaan mitigasi risiko, dan efektivitas mitigasi risiko
8. Melakukan penyusunan profil pegawai
9. Memanfaatkan Fraud Risk Scenario (FRS) untuk memantau adanya indikator kemungkinan terjadinya fraud

KINERJA LAIN-LAIN

01. Penghargaan



Juara Kedua Lomba Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Kanwil DJP Jawa Timur II Tahun 2024



Juara Umum Satker dengan Kinerja Terbaik Tahun 2024 Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II

Penghargaan Satuan Kerja Terbaik/Tertinggi Pertama Tahun 2024 Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II



Satker dengan Capaian PKM
Pemeriksa



Satker dengan Pemantauan Program
Pengendalian Gratifikasi (PPG)



Satker dengan Pertumbuhan
Penerimaan Netto



Satker dengan Peraih Tingkat
Kemenangan atas Banding dan Gugatan



Satker dengan Tingkat Pengelolaan BMN
Sub Penetapan Status Penggunaan BMN



Satker dengan KPD Kewilayahan

Penghargaan Satuan Kerja Terbaik/Tertinggi Kedua Tahun 2024 Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II



Satker dengan Capaian Kinerja Penagihan



Satker dengan Capaian Kinerja Pemeriksa



Satker dengan P4DK Kewilayahan



Satker dengan Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan



Satker dengan Nilai Inovasi Tertinggi



Satker dengan Tidak Lanjut Hasil Penilaian Terbaik

Penghargaan Satuan Kerja Terbaik Ketiga Tahun 2024 Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II



Satker dengan Usulan Bantuan
Penilaian Terbaik



Satker dengan Kualitas Pengamatan
Terbaik



Satker dengan Pengelolaan Ruang
Server Terbaik



Satker dengan Penambahan Wajib
Pajak Hasil Ekstensifikasi Terbaik

Penghargaan Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara Tahun 2024



**Terbaik II
Kepala Seksi Pengawasan Strategis
Tingkat Kanwil DJP
Jawa Timur II
TW I tahun 2024**

**Terbaik I
AR Pengawasan Strategis
Tingkat Kanwil DJP Jawa Timur II
TW I tahun 2024**



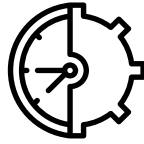
**Juara II Tenis Meja
Peringatan Hari Pajak Tahun 2024
Tingkat Kanwil DJP Jawa Timur II
dan Juara III Tenis
Peringatan Hari Pajak Tahun 2024
Tingkat Kanwil DJP Jawa Timur II**

02. Inovasi



Before

Diselesaikan dalam waktu 21 hari kerja sejak permohonan di terima secara lengkap



After

Diselesaikan dalam waktu 10 hari kerja sejak permohonan di terima secara lengkap



Percepatan Proses Penyelesaian Pemindahbukuan

<https://lindasidut.glide.page>



1

Memuat informasi mengenai peraturan perpajakan terbaru, dan tata cara beserta persyaratan pengajuan suatu permohonan

2

Survey Kepuasan Layanan

3

Sarana Layanan Pengaduan

Layanan Integrasi Berbentuk Web Page

Asistensi Pengisian SPT Tahunan

Penyelenggaraan LDK 2024	
Penyelenggara LDK	Jml
KPP Pratama Cimahi	130
KPP Pratama Garut	75
KPP Pratama Sidoarjo Utara	55
KPP Pratama Bengkalis	48
KPP Pratama Palu	47
KPP Pratama Bitung	46
KPP Pratama Balige	45
KPP Pratama Boyolali	37
KPP Pratama Jember	37
KPP Pratama Pekanbaru Tampus	37



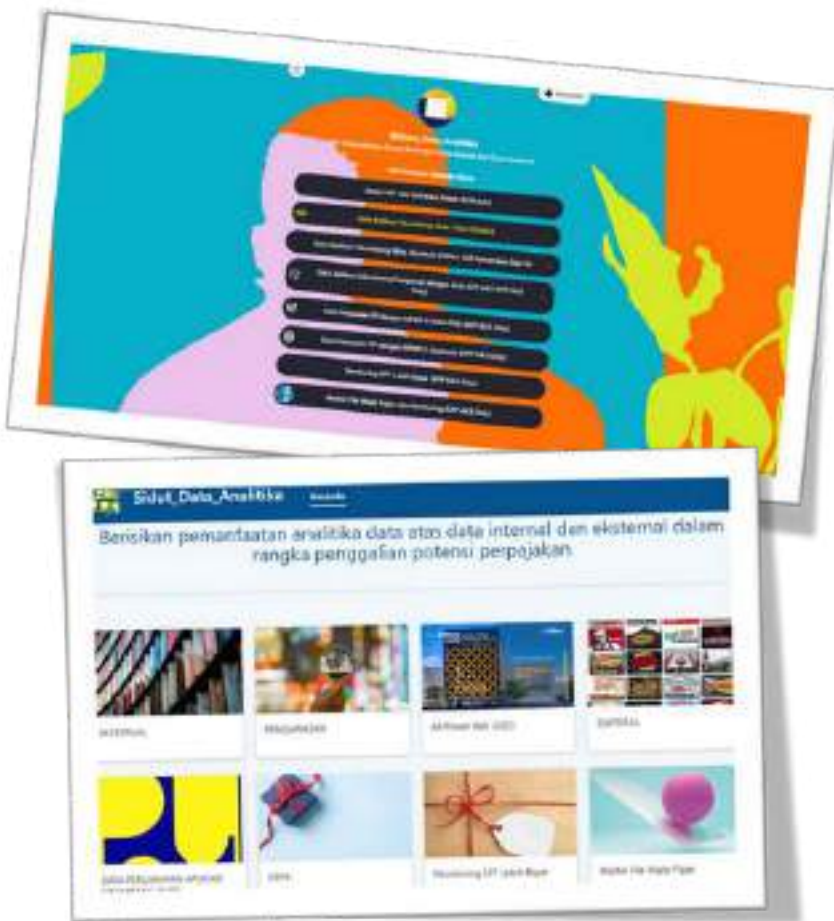
Asistensi atau program LDK (Layanan Di Luar Kantor) ini rutin dilaksanakan sejak tahun 2022. KPP Pratama Sidoarjo Utara menyelenggarakan program LDK sebanyak 55 kali pada tahun 2024.



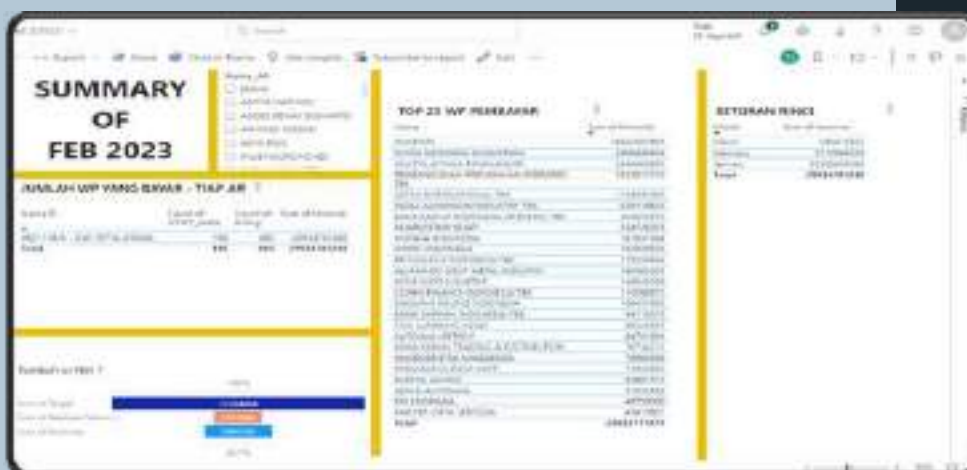
SIDUT ANALITIKA

Sebuah simplifikasi dan transformasi dari data menjadi pengetahuan penting (dashboard) yang dapat mempermudah pegawai untuk mendapatkan data pendukung (berasal dari internal/eksternal dalam bentuk data pemicu maupun penguji) guna penggalan potensi pajak dan melakukan pemeriksaan

• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •

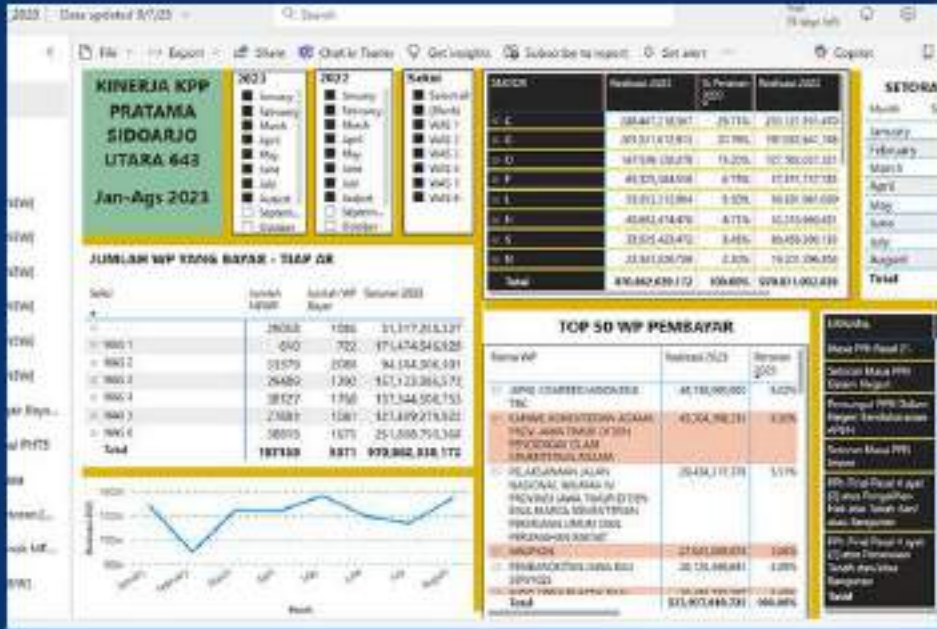


AR POWER 643



Sebuah dashboard yang dirancang untuk memudahkan Account Representative dalam melakukan pemantauan terhadap wajib pajak dan menyusun rencana kerja yang efektif dan efisien. Menampilkan data wajib pajak, setoran pajak yang bersifat internal DJP, dengan data-data yang diperoleh dari sumber eksternal

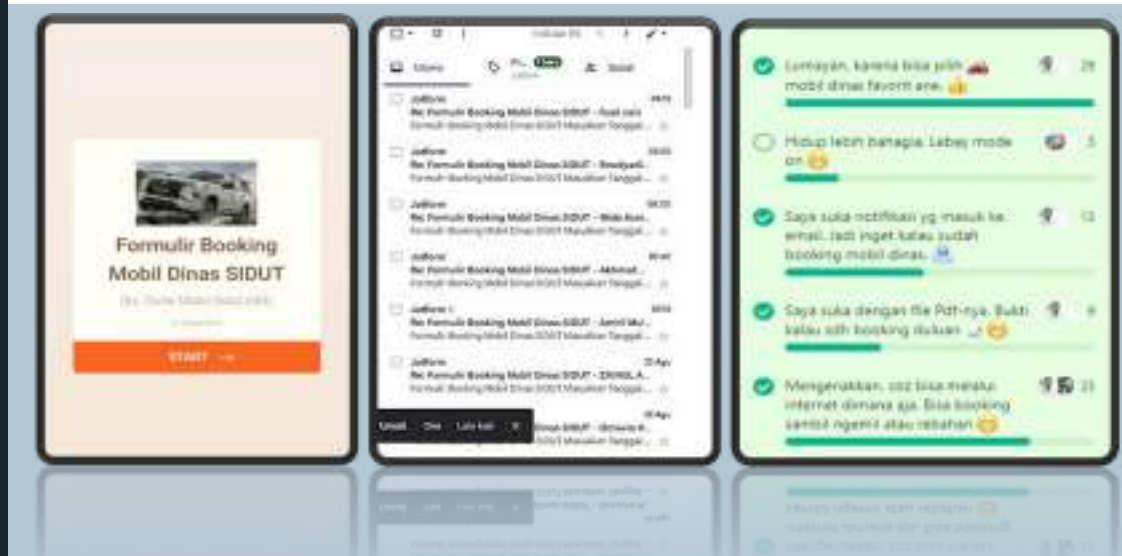
AR POWER 643



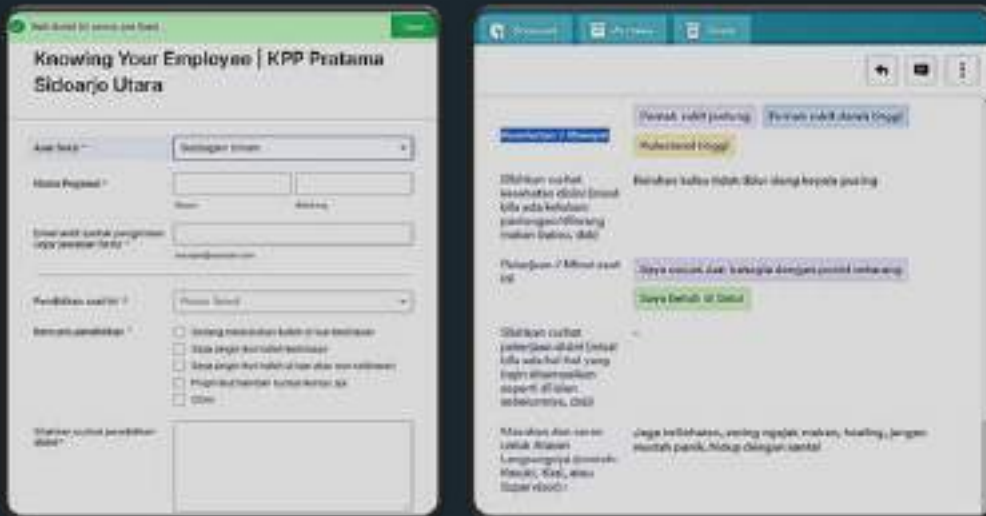
Pada AR Power 643 tersedia KKPT dan LHPT untuk perhitungan potensi pajak yang bisa langsung ditindaklanjuti oleh AR.

MobDin 643

Optimalisasi Kendaraan Dinas Operasional (KDO) yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara untuk kegiatan-kegiatan di luar kantor.



KYE 643



Sebuah simplifikasi dan transformasi dari data menjadi pengetahuan penting (dashboard) yang dapat mempermudah pegawai untuk mendapatkan data pendukung (berasal dari internal/eksternal dalam bentuk data pemicu maupun penguji) guna penggalan potensi pajak dan melakukan pemeriksaan

SIDUT HALO ADIK



Media yang digunakan sebagai sarana untuk menampung ide, gagasan, informasi dan keluhan internal secara unik, private, dengan tujuan memberikan kenyamanan bersama

03. Kegiatan Pendukung Lainnya

Pelaksanaan kegiatan Tax Gathering Tahun 2024 dalam rangka pemberian edukasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan pemberian apresiasi atas kontribusi wajib pajak



Pelaksanaan kegiatan Tax Gathering Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 bertempat di Hotel Luminor Sidoarjo

Dalam kegiatan ini, dihadiri oleh enam puluh wajib pajak terpilih yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan dan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi.

03. Kegiatan Pendukung Lainnya

Public Hearing (Forum Komunikasi Publik)

Forum yang diadakan oleh KPP Pratama Sidoarjo Utara dalam rangka menampung dan mendengar aspirasi langsung dari wajib pajak. Dalam kegiatan tersebut, juga dilakukan publikasi standar pelayanan dan permohonan dukungan dalam rangka Keberlanjutan Pembangunan Zona Integritas Bebas dari Korupsi



Dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024 bertempat di Aula Buduran KPP Pratama Sidoarjo Utara

Dihadiri oleh 6 unsur masyarakat, yaitu Wajib Pajak, Stakeholder (Kemenag, Otoritas Bandara, Pemerintah Daerah), Akademisi (Instansi bidang Pendidikan), Tokoh Masyarakat (Konselor Pendidikan, IKADI), Lembaga Swadaya Masyarakat (YAKINDO, LMI, Taman Zakat), Media (Radar Sidoarjo, Jawa Pos Televisi-JPM TV)

Publksi Standar Pelayanan juga disampaikan melalui media surat kabar online (suryakabar.com)

Pelaksanaan Edukasi Kepada Generasi Muda



Pelaksanaan Edukasi dikemas dalam bentuk kegiatan Tax Goes To School (TGTS) dan Pajak Bertutur (Patur) yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai literasi pajak sejak dini, mengenalkan konsep pajak dan perannya dalam pembangunan negara, dan membangun citra positif otoritas pajak

Pelaksanaan TGTS Tahun 2024 dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun. Pertama pada tanggal 24 Juli 2024 bertempat di SMA Negeri 1 Sidoarjo dan diikuti oleh siswa kelas XI dan yang kedua pada tanggal 13 November 2024 bertempat di SMK Antartika 2 Sidoarjo yang diikuti oleh siswa kelas XI



BAB IV

04

Penutup



PENUTUP

Sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang mengemban tanggung jawab yang besar atas penerimaan negara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan sistem perpajakan di Indonesia. Diantaranya adalah menjalankan fungsi pelayanan terhadap wajib pajak, melakukan pemungutan dan penerimaan pajak, melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi terkait perpajakan, dan fungsi penegakan hukum.



Dalam mengemban tanggung jawab tersebut, kinerja KPP Pratama Sidoarjo Utara diukur melalui suatu Perjanjian Kinerja yang terdiri dari serangkaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sub-IKU. Pada tahun 2024, untuk ketiga kalinya secara berturut-turut KPP Pratama Sidoarjo Utara berhasil memenuhi target utama penerimaan pajak yang diamanahkan sebesar 100.57% dari target yang ditetapkan atau senilai dengan Rp2.210.245.567.139. Hal ini tentunya tidak lepas dari kinerja yang baik dari seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara serta kerjasama dan kepercayaan yang baik dari masyarakat sebagai wajib pajak



Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim, dan para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian target dan pencapaian strategis KPP selama tahun 2024. Berbagai prestasi yang kami raih merupakan hasil dari dedikasi, kerja keras, dan juga komitmen bersama untuk mewujudkan pelayanan pajak yang lebih baik bagi masyarakat dan negara. Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara serta hambatan yang ditemui sepanjang tahun 2024 untuk mencapai target kinerja yang diamanahkan. Untuk masa yang akan datang, kami berkomitmen untuk dapat mencapai target yang telah diamanahkan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dan terus berusaha untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam melayani wajib pajak, memastikan penegakan hukum dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.



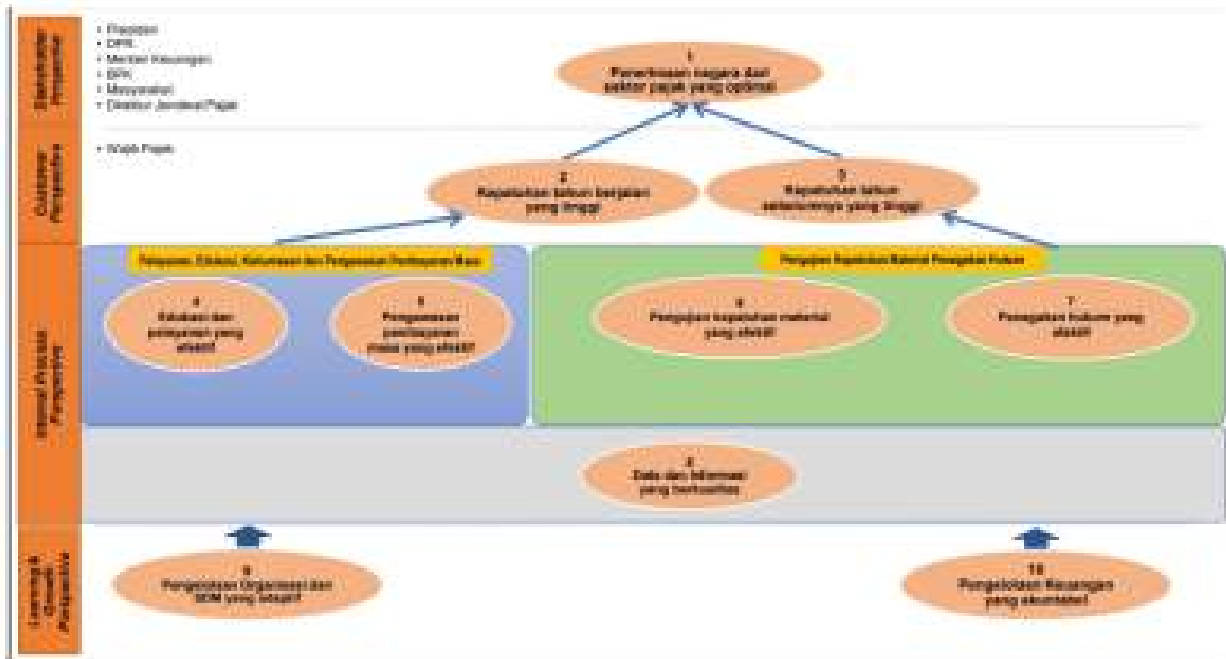
LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-10/WPJ.24/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO
UTARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA
TIMUR II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi **Milu** Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi **Kemendagri** Keuangan : "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO UTARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 1.147.066.000
1.EkstensifikasiPenerimaan Negara	Rp 489.074.000
2.Pelayanan,Komunikasi, dan Edukasi	Rp 306.471.000
3.Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 351.521.000
B.Program Dukungan Manajemen	Rp 4.984.187.000
1.PengelolaanKeuangan, BMN, dan Umum	Rp 4.045.383.000
2.PengelolaanOrganisasi dan SDM	Rp 938.804.000
Total	Rp 6.131.253.000

Direktor:  Wilayah
jak Jawa Timur II

Sidoario. 31 Januari 2024
Kepala Kantor  jak Pratama Sidoarjo

Ditandatangani Secara Elektronik
Agustin Vita Avantin

Ditandatangani Secara Elektronik
Bambang Sutrisno

**RINCIAN TARGET KINERJA
PELAYANAN PAJAK PRATAMA
WILAYAH DIREKTORAT JENDE
TIMUR II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	21%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	21%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	40%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	15%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	-	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90

10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel									
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sidoarjo, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Sidoarjo Utara



Ditandatangani Secara Elektronik
Bambang Sutrisno

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO
UTARAKANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAWA TIMUR II DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	Meningkatkan pemanfaatan media sosial dan <i>wa/sms blasting</i> kepada WP	Edukasi dan penyuluhan lebih efektif dan efisien.	Q1-Q4 a. Melakukan <i>WA/SMS Blasting</i> terkait kegiatan kelas pajak ataupun kegiatan penyuluhan lain yang dilakukan KPP b. Menggunakan media sosial untuk memberikan informasi perpajakan	Hasil survey kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan yang tinggi	Januari-Desember 2024	Seksi Pelayanan	113.135.000
2.	Persentase pengawasan pembayaran masa	Pengawasan dan/atau pengolahan data berdasarkan pembayaran masa pajak dan penerbitan STP terhadap WP yang terlambat melakukan pembayaran masa.	WP melakukan pembayaran dengan tertib, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak	Q1-Q4 Membuat LAPHIT atas STP	Meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka pembayaran pajak.	Januari-Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II,III,IV, V dan VI	368.158.000

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
3.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	SP2DK yang diterbitkan harus benar-benar berkualitas sehingga mendukung capaian target extra effort yang sudah ditetapkan	Peningkatan jumlah SP2DK berkualitas yang selesai ditindaklanjuti	Q1-Q4: - Menindaklanjuti saldo potensi Approweb yang masih open (SP2DK open) - Menindaklanjuti saldo LHA CTA dan LHA Kanwil / Alket/data tertentu - Data Pemicu di Approweb yang potensial dengan memperhatikan skala prioritas - Tindak lanjut data yang dikirim oleh Kanwil (data tertentu) - Analisis mandiri berdasarkan data yang tersedia - Pemanfaatan data joint analisis DJP-DJBC	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tercapai sesuai target	Januari – Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II,III,IV, V dan VI	126.921.000
4.	Efektivitas Penagihan	Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap Para Penunggak Pajak yang mempunyai	Mendapatkan pencairan piutang dari calon PP yang akan dilakukan tindakan	Q1-Q4 : - Pengawasan pelaksanaan terhadap penagihan - Membuat daftar PP yang mempunyai hutang pajak diatas	Mendapatkan pencairan piutang dari calon PP yang akan dilakukan tindakan penagihan	Januari-Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	67.275.000

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		hutang pajak diatas 100 juta dengan menegur, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, usul penagihan, penyitaan dan penyanderaan	penagihan.	100 jt c. Melakukan asset tracing atas calon PP yang akan dilakukan pencegahan d. Melakukan pengamatan melalui media sosial maupun sarana lain tentang kegiatan PP yang bepergian ke luar negeri				
5.	Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	Peningkatan penyelesaian pemeriksaan yang berkualitas dan tertib administrasi dan peningkatan kualitas bahan baku pemeriksaan	Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu	Q1-Q4: a. Mengumpulkan data, informasi, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendukung pemeriksaan secara cepat dan efektif b. Strategi pemeriksaan mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya	Peningkatan produksi LHP dan SKPKB yang berkualitas	Januari-Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	52.443.000

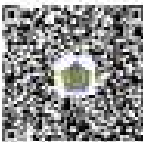
No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
6.	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai melalui peningkatan kompetensi sesuai tugas dan fungsi untuk mendorong produktivitas pegawai.	Melakukan Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi melalui jalur klasikal atau classroom (termasuk <i>In House Training</i> , pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta <i>Leadership Development Program</i>) dan metode non klasikal dengan menggunakan media <i>e-learning</i> dan <i>On the Job Training</i> .	Q1-Q4: - Pelaksanaan IHT tatap muka Min sebanyak 12 kali/tahun, dengan menerbitkan ND untuk seluruh pegawai - Pelaksanaan IHT melalui <i>Elearning</i> diikuti oleh seluruh pegawai maksimal 1 kali kegiatan/pegawai, dengan menerbitkan ND untuk seluruh pegawai	Target pencapaian per tahun untuk setiap unit kerja adalah 80% pegawai wajib memenuhi ketentuan pada table standard pemenuhan kompetensi : - Hasil <i>assesement center</i> bagi pejabat struktural - Hasil uji kompetensi teknis bagi FPP dan pelaksana	Januari-Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	54.000.000
7.	Indeks Penilaian Integritas Unit	Meningkatkan kepuasan pelayanan perpajakan atas	Hasil survey kepuasan layanan perpajakan yang tinggi	Q1-Q4 Melakukan survey kepuasan layanan	Hasil survey penilaian kepuasan integritas tinggi	Januari-Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI, Seksi Pelayanan,	66.000.000

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		responden eksternal (Wajib Pajak) dalam pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan dan penagihan pajak.		b. Pengawasan kepatuhan perpajakan c. Melakukan <i>In House Training</i> peningkatab integritas kepada seluruh pegawai			dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	

8.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari sisi penyerapan atau pencapaian keluaran, efisiensi, konsistensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, penyampaian LPJ, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM.	Agar Pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DIPA dapat dikelola sesuai rencana yang ditetapkan, dapat dipertanggungjawabkan dan menggunakan prinsip hemat, efisien, tidak mewah dan tetap dapat dipenuhi.	Q1-Q4: a. Melakukan perencanaan dan pengelolaan anggaran agar dapat dilaksanakan dengan maksimal dengan melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Keuangan (KPA, PPK, PPSPM, PBJ dan pegawai terkait lainnya)	Mendapatkan hasil penilaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan secara keseluruhan dengan hasil maksimal	Januari-Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	85.056.000
----	--	---	--	---	--	------------------------------	---------------------------------------	-------------------

				b. Melakukan kordinasi dan supervisi dengan instansi/pihak terkait - baik internal maupun pihak eksternal agar komponen proses. dapat dipenuhi secara maksimal.				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

Sidoarjo, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara



Ditandatangani Secara Elektronik
Bambang Sutrisno

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Bambang Sutrisno, S.E., Ak., M.E.		NAMA	Agustin Vita Avantin
NIP	197209041997031001		NIP	196508171992012001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
2.	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan	100%	Penerima Layanan

	(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Pembayaran Masa (PPM)		
4.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
5.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
6.	Edukasi dan pelayanan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
7.	Edukasi dan pelayanan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
8.	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	Proses Bisnis

9.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
10.	Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis
11.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
12.	Penegakan Hukum yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	Proses Bisnis
13.	Penegakan Hukum yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Tingkat efektivitas penagihan	75%	Proses Bisnis
14.	Penegakan Hukum yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis

	Pajak Jawa Timur II)			
15.	Data dan Informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
16.	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)	55%	Proses Bisnis
17.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
18.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
20.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran

	Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Timur II)			
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

PERILAKU KERJA		
	- Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	

	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawa



Ditandatangani secara elektronik

Bambang Sutrisno
197209041997031001

Sidoarjo, 31 Januari 2024
Pejabat



Ditandatangani secara elektronik

Agustin Vita Avantin
196508171992012001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	109 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	21%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	21%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%

6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	5%	5%	5%	85%	85%
8	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit						85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90

	20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI									
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.								
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.								

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Bambang Sutrisno
197209041997031001

Sidoarjo, 31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Agustin Vita Avantin
196508171992012001

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II
KPP KPP PRATAMA SIDOARJO UTARA
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	102,44
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,44
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,57%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,57
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	105,00	Max	P/L	19,00%	42,22%	105,00
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	101,02
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							101,19
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,56%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,56
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	102,05%	Max	P/L	19,00%	42,22%	102,05
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,85
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,85%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,85
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	117,67
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,74
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	111,48%	Max	E/M	21,00%	50,00%	111,48
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	119,23%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,91
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,73%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,73
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	117,81%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	88,50%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,29
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,57
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,23	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,23
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,93	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,51
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,01	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,01
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,42

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

RINCIAN LAPORAN NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR II
KPP PRATAMA SIDOARJO UTARA
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

KODE IKU	NAMA IKU	FORMULA IKU		TARGET		REALISASI		GAP
				%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	Realisasi penerimaan pajak Target penerimaan pajak	x 100%	100.00%	2,197,619,387,000 2,197,619,387,000	100.57%	2,210,245,567,139 2,197,619,387,000	0.57%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)		100		105		
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%	100.00%	2,064,904,188,000 2,064,904,188,000	100.56%	2,076,407,409,963 2,064,904,188,000	0.56%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	$\left[\frac{(50,3 \text{ x jumlah SPT Tahunan PPh wajib pajak 2023 yang + jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat dan akurat) + (50,3 x jumlah SPT Tahunan PPh wajib pajak 2023 yang + jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat dan akurat)}}{(50,3 \text{ x jumlah SPT Tahunan PPh wajib pajak 2023 yang + jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat dan akurat) + (50,3 x jumlah SPT Tahunan PPh wajib pajak 2023 yang + jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat dan akurat)}} \right] \times 100\%$		100.00%		102.05%		2.05%
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%	100.00%	132,715,199,000 132,715,199,000	100.85%	133,838,157,176 132,715,199,000	0.85%
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}		74.00%		88.80%		14.80%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	Indeks Hasil Survei		100.00%		111.48%		11.48%
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))		90.00%		119.23%		29.23%
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))		100.00%		120.00%		20.00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	(Capaian pemanfaatan data STP) + (Capaian pemanfaatan Data Matching) 2	x 100%	100.00%		119.73%		19.73%
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan		100.00%		120.00%		20.00%
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)		100.00%		120.00%		20.00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)		75.00%		117.81%		42.81%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x 100%	100.00%		100.00%		0.00%
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} + \text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2}$	x 100%	100.00%		120.00%		20.00%

8b-CP	Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	$\left[70\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] + \left[30\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]$	55.00%		88.50%		33.50%																					
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)	100		117.23		17.23																					
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi	85		93.93		8.93																					
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko	90		99.01		9.01																					
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Triwulan1 s.d Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100) Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100) <table><tr><th>Indeks Tw IV</th><th>Formula Konversi Tw IV</th><th>Kriteria Indeks</th></tr><tr><td>120</td><td>120</td><td>Realisasi IKKPA > 95,00</td></tr><tr><td>100 < X < 120</td><td>100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 **</td><td>(91,00<Realisasi IKKPA<95,00)</td></tr><tr><td>100</td><td>100</td><td>Realisasi IKKPA = 91,00</td></tr><tr><td>80 < X < 100</td><td>80 + (Realisasi IKKPA - 80) : 0,55 *</td><td>(80,00<Realisasi IKKPA<91,00)</td></tr><tr><td>80</td><td>80</td><td>Realisasi IKKPA = 80,00</td></tr><tr><td>79,9</td><td>79,9</td><td>Realisasi IKKPA < 80,00</td></tr></table>	Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks	120	120	Realisasi IKKPA > 95,00	100 < X < 120	100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 **	(91,00<Realisasi IKKPA<95,00)	100	100	Realisasi IKKPA = 91,00	80 < X < 100	80 + (Realisasi IKKPA - 80) : 0,55 *	(80,00<Realisasi IKKPA<91,00)	80	80	Realisasi IKKPA = 80,00	79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00	100		120		20
Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks																										
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00																										
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 **	(91,00<Realisasi IKKPA<95,00)																										
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00																										
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKKPA - 80) : 0,55 *	(80,00<Realisasi IKKPA<91,00)																										
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00																										
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00																										

Mengetahui
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Nanik Tri Wahyuningsih
NIP 197510251995112001

Administrator Kinerja Organisasi,



Ditandatangani secara elektronik
Retno Supriyatningsih
NIP 197503081995112001



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-10A/WPJ.24/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor PK-10/WPJ.24/2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Target dan *Trajectory* Indikator Kinerja Utama

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85	-	-	-	85	85	85	85

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II,



Ditandatangani Secara Elektronik
Agustin Vita Avantin
NIP 196508171992012001

Sidoarjo, 2 September 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Utara



Ditandatangani Secara Elektronik
Nanik Triwahyuningsih
NIP 197510251995112001